

## **Bab I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sejak diawal kemunculannya baik ketika masih menjadi PK ataupun sudah menjadi PK (Sejahtera), partai ini dinilai banyak pengamat akan menjadi *prototipe* partai masa depan, namun tidak sedikit juga yang menyangsikan eksistensi partai ini akan bertahan pada pemilu-pemilu selanjutnya. Alasannya adalah karena partai ini didasarkan pada ideologi Islam. Dikemukakan alasan tersebut diindikasikan dengan adanya *platform*, pengurus dan simpatisan dari ‘kelompok muslim’ tertentu yang pada saatnya partai ini akan berubah menjadi partai eksklusif (Kevin Raymond Evans, 2003, hal. 132-133). Namun dalam pandangan berbeda pernyataan tersebut memerlukan pembuktian ilmiah dan konkrit, menurut Haidar Nashir dalam *Gerakan Islam Syariat: Reproduksi Gerakan Salafiah di Indonesia* secara *implisit* menyatakan dengan ‘Islam’ PKS mampu merumuskan kebijakan dan bahkan isu-isu yang bertautan dengan persoalan Islam sebagai ideologi dalam kehidupan bangsa dan Negara di Indonesia menjaga eksistensi partai (Nashir, 2007, hal. 267-277).

Di luar parlemen, program-program di tingkat nasional dan daerah para kader PKS giat melakukan dakwah baik di lingkungan masyarakat, kampus, hingga ke sekolah-sekolah dan banyak dari mereka merupakan da’i, di samping itu para kader juga aktif menyuarakan aspirasi ke-ummat-an, dari pengecaman terhadap tentara Israel hingga aksi-aksi korupsi, dengan cara melakukan aksi demonstrasi yang tertib, damai dan para kader juga tetap mencerminkan citra ke-Islamannya.

Melalui pola-pola ini PKS *survive* dalam mengarungi perpolitikan di Indonesia. Hal demikian dapat dilihat ketika PK telah berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), pada saat pemilihan umum tahun 2004 suaranya naik secara signifikan menjadi 7,34 % (8.325.020) dengan perolehan 45 kursi di DPR RI dan menempati peringkat keenam partai dengan suara terbanyak serta mampu menghantarkan Hidayat Nur Wahid sebagai ketua MPR RI periode 2004-2009. Sedangkan pada pemilu 2009, PKS juga memperoleh kenaikan suara, meski perolehan tidak meningkat tajam seperti pada pemilu 2004, yaitu menjadi 7,88% (naik 0,68 %) dengan 57 kursi di DPR (Miriam Budiardjo, 2005, hal. 454).

Memasuki gerbang tahun 2013, aura dan hingar bingar Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan sudah sangat begitu berasa, aneka manufer diluncurkan kontestan baik dari *brand* dan *statement* politik, Visi dan Misi hingga isu-isu seksi yang dirangsang dari para pialang politik membuat peta perpolitikan Sumatera Selatan semakin bergairah. Hal demikian demi merebut kemenangan, tebaran spanduk dan baliho di sepanjang jalan, pusat pertokoan, pemukiman padat penduduk, hingga pajangan wajah di rubrik media cetak dan elektronik (lokal maupun nasional). Tujuannya semata untuk dapat meningkatkan elaktabilitas suara. Pilihan beresiko setinggi apapun harus diputuskan kandidat karena mengingat *rival politik* bukanlah lawan ringan dapat dikalahkan dengan satu pukulan (*knock out*).

Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Sumatera Selatan menetapkan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Sumatera Selatan 2013 dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2013. Dalam menyikapi momentum pemilukada Sumatera Selatan, partai-partai politik dengan segala kapasitas dan amunisi yang dimiliki digunakan sebagai manufer dalam mengintervensi momentum pemilukada tersebut. Tidak halnya partai nasionalis, partai Islam pun tidak ketinggalan dalam memanfaatkan momentum ini sebagai ajang kompetisi politik dan pemilihan strategi

yang tepatlah yang dapat menjawab hasil dari kompetisi politik. Dalam strategi politik tidak saja membahas bagaimana memenangkan pasangan calon kandidat tetapi menentukan siapa yang akan dimajukan di dalam kompetisi juga menjadi awal proses strategi.

Menurut Yasraf A. Piliang, dunia politik tidak hanya ruang tempat lalu-lalangnya entitas fisik dan psikis (aktor, sarana, ide, obyek) akan tetapi lebih penting adalah gagasan ide atau konsep. Politik tidak hanya aktor, materi dan obyek (sumber daya fisik) dimobilisasi dalam rangka mendapatkan kekuasaan, akan tetapi lebih penting adalah bagaimana ide diproduksi, dieksploitasi, dimanipulasi, direkayasa dan dimobilisasi dalam rangka memenangkan penerimaan publik (Piliang, 2005, hal. 22).

Dalam rangka memenangkan penerimaan publik dibutuhkan suatu formulasi strategi jitu dalam memenangkan kontestasi politik. Menurut Firmasyah strategi dimaksud dibutuhkan suatu tahapan proses pemasaran politik tersebut meliputi *segmentasi*, *targeting* dan *positioning* (Firmasyah, 2007, hal. 212). Hasil dari proses tersebut akan memudahkan partai politik atau bahkan pasangan calon kandidat dalam menyusun strategi politik untuk menjaring pemilih atau mendulang suara sebanyak-banyaknya.

Terdapat empat pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang telah mengembalikan formulir pendaftaran di KPUD Sumsel dan keempat pasangan tersebut dipastikan menjadi kontestan pemilukada Sumatera Selatan 2013. Pasangan pertama mengembalikan formulir adalah Pasangan Herman Deru (Bupati OKU Selatan) dengan Maphilinda Syahrial Oesman (Istri Mantan Gubernur sumsel Syahrial Oesman) yang mendeklarasikan sebagai pasangan DERMA, Pasangan ini didukung oleh Kekuatan Empat Partai Parlemen dengan Total Kursi sebanyak 18 Kursi (PKB 3, HANURA 4, GERINDRA 6, dan PPP 5) dan beberapa Partai Kecil Non Parlemen (Sumatera Ekspres 12 Maret 2013, hal. 1. Lihat juga Sriwijaya Pos, Seputar Indonesia, dll).

*Kedua* pasangan *incumbent* Alex Noerdin (Ketua DPD Partai Golkar Sumsel) yang berpasangan dengan Bupati Ogan Komering Ilir Ishak Mekki (Ketua DPD Partai Demokrat Sumsel). Pasangan yang ini didukung penuh oleh Partai Golkar (16 Kursi parlemen) dan Partai Demokrat (13 Kursi) serta Partai Bulan Bintang (1 Kursi). *Ketiga* Eddy Santana Putra (Walikota Palembang) yang juga Ketua DPD PDIP Sumatera Selatan dengan Pasangannya Anisa Juita Tatung (Wiwit Tatung) mengembalikan formulir sebagai Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusung oleh PDIP (11 Kursi) dan PKPB (1 Kursi). *Keempat* pasangan kandidat terakhir yang sempat ‘menggegerkan’ Peta politik pada Pilgub Sumsel 2013 ini karena kemunculannya sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur pada *last minute* tidak diperkirakan oleh banyak pihak, pasangan calon tersebut adalah Kapolda Sumatera Selatan Irjen (Pol) Iskandar Hasan, Jenderal Kelahiran Kabupaten Musi Rawas yang pernah menjabat Kapolda di Tiga Daerah Teritorial dan Mantan Kadiv. Humas Mabes Polri ini digadang-gadang oleh PKS (7 Kursi), PAN (5 Kursi) serta PBR (2 Kursi) yang berpasangan dengan Hafiz Tohir (Salah satu Ketua DPP PAN) yang tidak lain merupakan Adik Kandung Menko Perekonomian Hatta Rajasa (Sumatera Ekspres 15 Maret 2013, hal. 1. Lihat juga Berita Pagi, Sriwijaya Pos, Seputar Indonesia, dll).

Tabel 1.

## Daftar calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Selatan 2013

NO	URAIAN	No	NAMA CAGUB DAN CAWAGUB
I	Pasangan calon gubernur – wakil gubernur <i>incumbent</i>	1.	Alex Noerdin – Ishak Mekki
II	Pesaing Pasangan calon gubernur – wakil gubernur <i>incumbent</i>	2.	Eddy Santana Putra – Anisja Djuita
		3.	H Herman Deru – Maphilinda Syarial Oesman
		4.	Iskandar Hasan – Hafisz Tohir

Pasangan calon *incumbent* dan dua pasangan calon lainnya pesaing *incumbent* (Alex Noerdin – Ishak Mekki, Eddy Santana Putra – Anisja Djuita, dan Herman Deru – Maphilinda Syarial Oesman) merupakan pasangan kandidat yang menjabat sebagai kepala daerah dan hanya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung oleh PKS yang merupakan pasangan non-kepala daerah, Iskandar Hasan – Hafisz Tohir. Sebagai kepala daerah, baik pasangan calon *incumbent* maupun kedua pesaingnya sangat mengerti dan memahami masalah-masalah yang ada di tengah masyarakat terkhusus di wilayah yang dipimpinnya, sehingga memudahkan dalam menyusun strategi politik untuk mencapai kemenangan pada pemilihan gubernur Sumsel 2013.

Selain itu, pesaing pasangan kandidat yang diusung PKS merupakan ketua-ketua partai politik di tingkat provinsi yang secara otomatis memiliki kedekatan dengan masyarakat secara umum dan konstituen partai secara khususnya. Berbeda halnya dengan pasangan Iskandar Hasan – Hafisz Tohir, Iskandar merupakan Kapolda Sumatera Selatan dan Hafizh Tohir merupakan pengusaha sekaligus menjabat di kepengurusan pusat Partai Amanat Nasional, namun ketidakpunyaan basis wilayah menyulitkan dalam segmentasi daerah tempat sumber kantong suara apalagi keduanya kurang populis dan tergolong baru diperpolitikan Sumatera Selatan sehingga bukan perkara mudah bagi PKS dan partai koalisi untuk mensukseskan pasangan tersebut mencapai kemenangan pada pemilihan gubernur Sumsel 2013.

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengkaji dan menganalisis strategi politik partai Islam pada Pemilihan Umum Kepala Daerah provinsi Sumatera Selatan 2013 yang dalam hal ini PKS dijadikan sebagai unit analisis. Alasan mengapa PKS dijadikan sebagai unit analisis adalah *pertama*, PKS adalah partai berideologi Islam, sebagaimana dalam AD/ART partai berasaskan Islam dengan tujuan terwujudnya masyarakat madani yang adil dan sejahtera yang diridhai Allah SWT dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (AD/ART PKS pasal 2 dan pasal 5). Imdadun Rahmat

(2008, hal. 133) menerangkan bahwa dengan Islam lahir dua nomenklatur PKS yaitu ‘Jati Diri’ partai dan ‘Manifesto’ partai. Dan menurut Aay M Furqon (2004, hal. 124) Islam menjadi kaca mata pandang PKS untuk memahami realitas politik untuk membangun strategi-strategi perjuangan politik. *Kedua*, latar belakang pasangan kandidat yang di usung dari PKS, Iskandar Hasan – Hafisz Tohir bukan merupakan pasangan non-kader, Iskandar Hasan adalah Kapolda Sumatera Selatan dan Hafisz Tohir adalah pengusaha sekaligus politisi dari partai PAN sehingga memungkinkan keduanya tidak memiliki kaca mata pandang yang sama terhadap nilai-nilai perjuangan politik PKS.

Selain itu, nilai tawar (*bargaining*) PKS dibanding dengan partai koalisi lebih memiliki prosentase lebih besar dalam perolehan suara atau kursi di DPRD 2009-2014, yaitu 9,3 persen, sedangkan prosentase partai koalisi, Partai Amanat Nasional (PAN) sebesar 6,7 persen dan Partai Bintang Reformasi (PBR) sebesar 2,7 persen. Namun dalam realitas politiknya, PKS terkesan mengalah karena calon yang diusung, baik calon gubernur ataupun calon wakil calon gubernur bukanlah dari kalangan internal PKS apalagi kedua pasangan yang diusung bukanlah pasangan yang sepopuler pasangan *incumbent* dan kedua pasangan kandidat lainnya.

Maka dalam membangun argument-argumen ilmiah, penelitian ini berusaha mengkaji dan menganalisis strategi politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada pemilihan umum kepala daerah Sumatera Selatan tanggal 6 Juni 2013. Adapun fokus penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi PKS mengusung pasangan Iskandar Hasan – Hafisz Tohir dan strategi politik PKS dalam kemenangan pasangan Iskandar Hasan – Hafisz Tohir pada Pemilu Kabupaten Sumatera Selatan 2013.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, persoalan mendasar yang berusaha dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi partai Islam dalam kontestasi politik yang dalam hal ini PKS dijadikan sebagai instrument penelitian. Persoalan ini dianalisis melalui rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa alasan PKS mengusung pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur pada pemilihan umum kepala daerah provinsi Sumatera Selatan tahun 2013?
2. Bagaimana strategi PKS dalam memenangkan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur pada pemilihan umum kepala daerah provinsi Sumatera Selatan tahun 2013?

## **C. Tujuan dan manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui alasan PKS mengusung pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur pada pemilihan umum kepala daerah provinsi Sumatera Selatan tahun 2013.
- b. Untuk mengetahui strategi PKS dalam memenangkan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur pada pemilihan umum kepala daerah provinsi Sumatera Selatan tahun 2013.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Akademik**

Sebagai kajian ilmu politik yang berkaitan dengan strategi politik partai Islam pada pemilihan umum kepala daerah provinsi Sumatera Selatan tahun 2013. Diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dalam menambah wawasan keilmuan khususnya dalam strategi politik.

b. Praktis

Referensi bagi praktisi politik 'Islam' atau calon kandidat selanjutnya dalam merancang sebuah strategi politik pada pemilihan umum kepala daerah.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Dari hasil penelusuran pustaka yang penulis lakukan, terdapat beberapa karya/buku yang mengkaji Partai Keadilan Sejahtera, di antaranya pertama, karya Yon Machmudi yang berjudul Partai Keadilan Sejahtera: Wajah Baru Islam Politik Indonesia. Buku ini secara mendasar mengilustrasikan PKS dari awal perkembangan hingga menjadi partai yang berhasil pada Pemilu 2004. Machmudi mengkritik kategorisasi- kategorisasi yang lama tentang Islam Indonesia yang tidak memadai lagi dalam menggambarkan PKS dan munculnya gerakan Tarbiyah. Selanjutnya, Machmudi menambahkan tipologi santri dalam tiga aliran, konvergen, radikal, dan global. Terkait dengan penelitian ini Machmudi tidak spesifik mengulas strategi kemenangan PKS pada tiap-tiap Pemilu atau Pilkada secara praksis, hanya saja Machmudi menggambarkan tentang strategi kultural yang dilakukan PK Sejahtera, yakni melalui dakwah-dakwah kampus, pengajian, dan solidaritas kemanusiaan. Adapun strategi politik (pemenangan) yang terkait langsung dengan Pemilu ataupun Pilkada tidak banyak disinggung.

Kedua, buku karya Aay Muhammad Furkon, Partai Keadilan Sejahtera: Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer. Secara ideologi-politik, Furkon mensinyalir adanya hubungan geneologis antara PKS dan Ikhwanul Muslimin yang berkembang di Mesir, terutama dari segi pemikirannya. PKS banyak dipengaruhi oleh pemikiran Hasan Al-Banna, tokoh kunci Ikhwanul Muslimin.

Ketiga, buku yang ditulis oleh Ali Said Damanik, Fenomena Partai Keadilan ; Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia. Buku ini lebih banyak bercerita tentang sejarah kelahiran PK Sejahtera, terutama pada Gerakan Tarbiyah di Indonesia

yang banyak terdapat di kampus- kampus negeri – ITB, UI, UGM, dan lain-lain – sebagai embrio kelahiran partai. Keempat, Buku yang ditulis oleh Sapto Waluyo, kebangkitan Politik Dakwah: Konsep dan Praktek Politik Partai Keadilan Sejahtera di Masa transisi. Buku ini mengulas dinamika dan konstalasi politik nasional di Indonesia, khususnya politik Islam pada masa transisi 1998-2004. Buku ini juga mengungkapkan bahwa Islam politik tetap eksis dimasa transisi, Sapto Waluyo lewat buku ini menegaskan bahwa ditengah konstalasi masa transisi masih ada setitik bintang kian berkilau itulah politik dakwah yang diusung kalangan aktifis muda muslim yang sebelumnya telah intens mengkaji norma- norma religious dan kaitannya dengan tuntutan kehidupan yang lebih luas. Dari halaqah (lingkaran studi) sebagai motor utama tarbiyah (proses edukasi) itulah, mereka melakukan lompatan sejarah, membentuk partai politik. Partai keadilan (PK) kemudian berubah namanya menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi harapan baru bagi umat dan bangsa, asset sejarah yang akan terus diuji konsistensi dan konstribusi positifnya bagi keummatan, kebangsaan dan kemanusiaan.

Untuk penelitian yang secara khusus mengkaji Partai Keadilan Sejahtera terkait dengan strategi pemenangan pasangan kandidat pada pemilukada provinsi Sumatera Selatan sejauh ini penulis belum menemukannya sehingga penelitian ini merupakan pertama tentang kiprah Partai Keadilan Sejahtera di Sumatera Selatan.

### **E. Kerangka Teori**

Berpikir dan bertindak dengan menggunakan strategi merupakan suatu keharusan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah diinginkan. Tanpa strategi, mustahil sebuah tujuan akan tercapai secara maksimal. Dalam konteks ini, strategi jelas diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak terkecuali dalam politik, strategi merupakan komponen penting dalam rangka

mewujudkan tujuan-tujuan politik yang telah ditentukan oleh sekelompok orang. Dalam bagian ini, dibahas mengenai pengertian strategi, jenis-jenis strategi politik yang digunakan dalam upaya mewujudkan tujuan-tujuan yang telah ditentukan, kaitannya dengan strategi dalam upaya peningkatan suara dalam Pemilu/pemilukada.

Gatot Widayanto (dalam Dody Rudianto dan Budy Sudjijono, 2003, hal. 16) menyatakan bahwa asal mula munculnya ‘strategi’ berawal dari lingkungan militer, sekitar 500 tahun SM. Jendral Sun Tzu megartikan ‘strategi’ sebagai salah satu cara untuk dengan mudah menaklukkan lawan, kalau perlu tanpa pertempuran, atau dengan kata lain strategi diperlukan jika ada lawan. Selanjutnya Faudy Tjiptono menyebutkan bahwa istilah ‘strategi’ itu sendiri barasal dari bahasa latin, yaitu *strategia* yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jendral. (Dody Rudianto dan Budy Sudjijono, 2003, hal. 16)

Konsep ini jelas sesuai dengan situasi pada zaman dahulu yang sering diwarnai perang, dimana jendral dibutuhkan untuk memimpin suatu angkatan perang agar selalu dapat memenangkan peperangan. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa ‘strategi’ pada zaman dahulu merupakan suatu hal. yang erat kaitannya dengan dunia militer, khususnya dalam kaitannya dengan perang. Dalam perkembangannya, istilah ‘strategi’ mengalami perluasan makna dan sesuatu perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Pengertiannya pun semakin disesuaikan dengan perubahan dan tuntutan zaman.

Dalam konteks sejarah, kata ‘strategi’ baru dikenal atau diperlukan dalam dunia ekonomi setela era industrialisasi, yaitu munculnya strategi perusahaan yang diperlukan dalam kepemimpinan terencana atas orang-orang dalam satu perusahaan. (Peter Schroder, 2000, hal. 8). Sejak saat itu, secara perlahan pengertian ‘strategi’ semakin diperluas bagi segala aspek kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi dipahami secara sempit dalam bidang militer saja. Perluasan makna ‘strategi’ tentu saja semakin dikenal

oleh berbagai kalangan untuk digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Dalam konteks ini, kalangan pebisnis dan politisi pun tak ketinggalan untuk menggunakan strategi dalam aktivitasnya. Dalam dunia politik misalnya, orang lalu menyebut strategi politik, begitu juga dalam dunia bisnis maka penyebutannya pun akan menyesuaikan. Dalam dunia politik, politisi menggunakan strategi politik untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Akan tetapi, cara menerapkan strategi politik berbeda dalam konteks strategi militer.

Strategi politik adalah strategi yang digunakan untuk mewujudkan cita-cita politik (Peter Schroder, 2000, hal. 7). Begitu pentingnya penerapan strategi sehingga setiap kelompok masyarakat mau tidak mau harus mampu bersaing menyusun sebuah strategi politik yang mampu memberikan kemenangan. Karena tanpa strategi politik, kekuasaan yang merupakan tujuan utama berpolitik tidak akan pernah terwujud. Dalam konteks manajemen, strategi dikenal dengan istilah manajemen-strategik. Selain itu, telah diadopsi pula prinsip-prinsip manajemen pemasaran yang dalam implementasinya digunakan oleh organisasi partai politik, terutama dalam kerangka berpikir strategi pemasaran. Akibatnya, istilah-istilah pemasaran pun telah lekat dalam konteks strategi dalam dunia politik.

Firmansyah (2007, hal. 212) memaparkan mengenai pendekatan-pendekatan yang menggunakan kerangka berpikir strategi pemasaran atau *political-marketing* yang juga telah dipakai dalam strategi politik :

a. Segmentasi

Segmentasi adalah pemilihan kelompok orang yang dengan suatu cara yang sama memberikan tanggapan terhadap seperangkat rangsangan pemasaran tertentu. Jelasnya, segmen adalah suatu kelompok yang mempunyai tanggapan yang sama. Kandidat politik pun sudah banyak yang tidak lagi menganut pemasaran secara massal, tetapi menggunakan segmentasi pasar agar

mendapatkan hasil yang lebih baik. Segmentasi sendiri dapat dibagi ke dalam empat kategori:

- 1) Segmentasi geografik, yaitu pembagian pasar menjadi unit-unit geografis, seperti suku, ras, propinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa dan dusun.
- 2) Segmentasi demografik, yaitu suatu pemilahan pasar menjadi kelompok-kelompok berdasarkan variable demografi, misalnya jenis kelamin, umur, agama, suku, profesi pendidikan dan sebagainya.
- 3) Segmentasi psikografis, yaitu konstituen dibagi menjadi kelompok yang berbeda berdasarkan kelas sosial, gaya hidup, sifat atau kepribadian.
- 4) Segmentasi perilaku, yaitu konstituen dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan pengetahuan, sikap, tanggapan, manfaat, status, kesetiaan, kesiapan, perhatian terhadap kemanusiaan dan sebagainya

Menurut Adman Nursal segmentasi pada dasarnya bertujuan untuk mengenal lebih jauh kelompok-kelompok pasar (pemilih) yang berguna untuk mencari peluang, menggerogoti segmen pemimpin pasar, merumuskan pesan-pesan komunikasi, melayani dengan baik, mendesain produk, dan sebagainya. (Nursal, 2004, hal. 110).

Selanjutnya Adman Nursal (2004, hal. 159) menetapkan segmen-segmen yang menjadi sasaran, terdapat tiga pilihan strategi yang sering digunakan menggarap segmen-segmen pasar yang telah dilakukan. Ketiga strategi itu antara lain:

- 1) Strategi pemasaran serba sama (*undifferentiated-marketing*), yaitu strategi yang diterapkan dengan mengabaikan perbedaan-perbedaan setiap segmen. strategi ini bertujuan untuk meraih pemilih sebanyak mungkin dengan merancang suatu program pemasaran guna membidik sebagian besar pemilih.
- 2) Strategi pemasaran serba-aneka (*a differentiated marketing strategic*), yaitu merancang beberapa program pemasaran untuk segmen-segmen yang

berbeda. Dengan cara ini diharapkan kandidat pemilu/pemilukada memiliki posisi yang kuat di setiap segmen. Strategi ini efektif jika program-program itu diikat dengan ‘benang-merah’ yang membentuk persepsi bahwa secara umum kandidat politik menawarkan program besar dan konsisten pada setiap segmen meskipun dengan penyesuaian-penyesuaian tertentu.

- 3) Strategi pemasaran terpusat (*concentrated marketing strategic*), yaitu strategi yang digunakan untuk membidik satu atau beberapa segmen pasar. Prinsipnya lebih baik merangkul bagian pasar yang luas dari satu atau sejumlah segmen daripada memperoleh pasar yang sedikit dari segmen pasar yang luas.

Strategi mana yang terpilih tergantung pada partai atau posisi pasangan kandidat, antara lain berkaitan dengan sumber daya, tahap siklus hidup, para pesaing (rival politik) dan sebagainya.

#### b. *Targetting*

*Targetting* adalah pemilihan (fokus) pada suatu segmen tertentu yang ingin dicapai. Dengan kata lain, *targetting* adalah keputusan untuk membidik suatu kelompok konstituen tertentu yang diperkirakan sangat mudah diraih (Dodi Rudianto dan Budy Sudjijono, 2003, hal. 21). Sebelum menentukan target, hal yang perlu diperhatikan sebelumnya adalah dengan memahami terlebih dahulu wilayah pemilihan. Perlu juga dianalisis sebaran pemilih secara geografis dan bagaimana mendekati para pemilih secara efektif dan efisien.

Kandidat peserta pemilu/pemilukada mestinya memiliki kelompok-kelompok target tertentu untuk dimenangkan hati dan suaranya guna mendulang suara dalam pemilihan umum. Dalam konteks ini Badjoeri Widagdo (2004, hal. 69) mengilustrasikan, seperti halnya partai politik berbasis Islam, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan *captive-market*-nya dari warga Nahdiyyin (NU), ataupun

Partai Amanat Nasional (PAN) dengan *captive-market*-nya dari keluarga, simpatisan atau anggota Muhammadiyah. Artinya, apabila seorang kandidat berasal dari Musi Rawas dan ia juga pernah menjadi Bupati, maka *captive-market*-nya dari warga Musi Rawas, atau apabila seorang kandidat orang/berasal dari Ogan Komering Ilir dan ia juga pernah menjadi Bupati, maka *captive-market*-nya dari warga Ogan Komering Ilir, dan begitu seterusnya.

c. *Positioning* ( penentuan posisi )

Dalam ilmu politik, *positioning* adalah usaha pencapaian pesan politik atau menjejalkan sesuatu mengenai 'kandidat' politik ke dalam konstituen atau calon konstituen. *Positioning* juga berarti strategi komunikasi untuk menanamkan citra tertentu kepada satu atau beberapa kelompok pemilih. Penentuan posisi ini dimaksudkan untuk mendapatkan seorang kandidat dalam keberadaan yang berbeda terhadap posisi kandidat lain, atau dengan kata lain bagaimana memosisikan kedudukan seorang kandidat agar dapat diterima, harus diungkapkan dalam pernyataan yang mudah, enak didengar dan dapat dipercaya dalam sebuah komunikasi masyarakat yang akan dijadikan target. Penggunaan simbol-simbol atau jargon politik dimungkinkan dalam upaya menarik simpati massa. Di samping itu, mengasumsikan diri sebagai seorang kandidat yang mewakili kelompok yang tertindas atau seorang kandidat yang mengusung tema-tema perjuangan, seperti penegakan hukum, pejuang keadilan, ataupun seorang kandidat yang menghimpun komunitas beragama, juga merupakan taktik dalam upaya menentukan posisi. Kejelasan posisi bagi seorang kandidat menjadi sesuatu yang sangat penting, karena dengan posisi yang jelas maka para pemilih akan lebih mudah mengenal dan memahami maksud dari perjuangan kandidat yang disampaikan melalui janji-janji politiknya. Adman Nursal (2004, hal. 155) membagi jenis-jenis posisi seorang kandidat, antara lain:

- 1) Posisi kandidat berdasarkan kategori partai pendukung. Misalnya sebuah partai memosisikan dirinya sebagai partai 'nasionalis-religius', akan tetapi posisi ini terlalu umum sehingga tidak akan muncul perbedaan bagi para pemilih jika dibandingkan dengan kandidat dari partai nasionalis-religius lainnya.
- 2) Posisi kandidat berdasarkan atribut tertentu. Misalnya seorang kandidat menyatakan dirinya sebagai kandidat terkuat yang memilih sumber daya yang besar yang bisa dikerahkan untuk mewujudkan janji-janji politiknya kepada masyarakat.
- 3) Posisi kandidat berdasarkan benefit, di mana kandidat akan memberikan citra tertentu yang akan memberikan pendidikan gratis atau kandidat yang memperjuangkan nasib kaum-kaum tertentu.
- 4) Posisi kandidat berdasarkan kategori memilih. Misalnya, kandidat memosisikan dirinya sebagai kandidat wong cilik atau kelompok sosial tertentu.

Dari posisi yang sudah diambil oleh masing-masing kandidat, bisa digunakan beberapa kombinasi strategi untuk meraih simpati masyarakat luas. Strategi posisi tersebut antara lain:

- 1) Strategi penguat (*reinforcement strategy*), yaitu strategi yang digunakan oleh kandidat politik/konstestan yang telah dipilih karena mempunyai citra tertentu dan citra tersebut di buktikan melalui kinerja politik selama mengemban jabatan politik.
- 2) Strategi rasionalisasi (*rationalization strategy*) yaitu strategi yang dilakukan kepada kelompok pemilih yang sebelumnya telah memilih kandidat tertentu karena sebelumnya telah berhasil mengembangkan citra tertentu yang

disukai pemilih, akan tetapi kinerjanya kemudian tidak sesuai dengan citra tersebut.

- 3) Strategi bujukan (*inducement strategy*) yaitu strategi yang digunakan oleh sebuah kandidat yang mempersepsikan dirinya memiliki citra tertentu dan memiliki kinerja atau atribut- atribut yang cocok dengan citra lainnya.
- 4) Strategi konfrontasi (*confrontatiaoan strategy*) yaitu strategi yang diterapkan kepada para pemilih yang memilih kandidat dengan citra tertentu yang dianggap tidak cocok oleh pemilih dan kemudian kandidat tersebut tidak menghasilkan kinerja yang memuaskan pemilih.

Selain itu, dalam konteks strategi politik, merupakan upaya kandidat untuk menggunakan cara-cara atau strategi untuk mencapai cita-cita politik. Untuk mencapai cita-cita politik dimaksud, Peter Schroder (2000, hal. 104) membagi strategi ke dalam dua bagian, yakni strategi ofensif (menyerang) dan strategi defensif (bertahan). Strategi ofensif bisa berupa strategi untuk memperluas pasar dan atau strategi untuk menembus pasar. Sementara strategi defensif menyangkut strategi untuk mempertahankan dan strategi untuk menutup atau menyerahkan pasar.

- 1) Strategi ofensif (menyerang), yaitu apabila seorang kandidat ingin meningkatkan jumlah pemilihnya atau ingin meningkatkan perolehan suaranya. Untuk menjalankan strategi ini, dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki pandangan positif terhadap kandidat sehingga kampanye dapat berhasil. Pada dasarnya model dan strategi ini lebih ditujukan pada adanya perbedaan-perbedaan yang jelas dan menarik antara seorang kandidat dan kandidat yang lain, yang tujuannya untuk mengambil ahli pemilihnya. Artinya, bahwa mereka harus mampu menunjukkan perbedaan terhadap

keadaan yang berlaku pada saat itu keuntungan- keuntungan yang dapat diharapkan darinya.

a. Stratei Perluasan Pasar

Dalam kampanye pemilu/pemilukada, strategi perluasan pasar yang ofensif bertujuan untuk membentuk kelompok pemilu/pemilukada baru Di samping para pemilih yang telah ada. Oleh karena itu, harus ada penawaran baru atau penawaran yang lebih baik bagi para pemilih yang selama ini memilih kandidat pesaing. Jadi, yang menjadi fokus disini adalah strategi persaingan yang faktual dimana berbagai kandidat bertarung untuk kelompok pemilih dalam sebuah kompetisi. Strategi seperti ini perlu dipersiapkan melalui sebuah kampanye pengantar untuk menjelaskan kepada publik tentang penawaran baru apa saja dan penawaran mana saja yang lebih baik dibandingkan dengan penawaran para kandidat lain. Dalam implementasi politik, produk baru yang ditawarkan adalah politik baru atau lebih tepatnya, keuntungan yang dihasilkan politik baru perlu diiklankan. Untuk itu, politik pertama-tama harus dirumuskan secara jelas. Politik yang belum selesai sama tidak menarik dengan produk yang belum selesai. Produk atau politik semacam ini membutuhkan nama yang baru, diskripsi baru, dan keuntungan baru yang ditawarkan. Jika diinginkan, juga sebuah kemasan baru yang dihubungkan dengan individu-individu baru.

b. Strategi Menembus Pasar

Merupakan strategi pengalihan potensi secara optimal, atau pengalihan bagian yang dimiliki sekelompok target dimana keberhasilan telah diraih sebelumnya. Tujuan yang dimiliki, misalnya, adalah diperolehnya hasil yang lebih baik dalam sebuah kelompok target (misalnya, sebelumnya

hanya 5%, sekarang harus menembus 51%). Hal ini menyangkut pemasaran program yang dimiliki secara lebih baik dan peningkatan intensitas keselarasan antara program dan individu. Seperti halnya memperbesar tekanan terhadap kelompok-kelompok target, bagi organisasi ini berarti: *pertama*, peningkatan motivasi multiplikator dan pemegang jabatan melalui iklan keuntungan yang ditawarkan secara lebih baik. *Kedua*, Pemanfaatan jalur komunikasi yang baru. *Ketiga*, perbaikan argumentasi melalui pembinaan. *Keempat*, pengerakan emosi kelompok target dengan memanfaatkan iklim/keadaan tertentu atau dengan menciptakan gambaran musuh bersama (*common enemy*).

- 2) Strategi defensif, yaitu apabila seorang kandidat yang berkuasa ingin mempertahankan mayoritasnya atau jika pangsa pasar (politik) hendak dipertahankan. Strategi ini juga dapat muncul apabila sebuah pasar tidak akan dipertahankan lebih lanjut atau akan ditutup, dan penutupan pasar ini membawa keuntungan yang sebesar- sebesarnya.

- a. Strategi Mempertahankan Pasar

Strategi ini merupakan strategi yang khas untuk mempertahankan apa yang telah ada. Dalam hal ini, seorang kandidat akan memelihara pemilih tetap mereka dan memperkuat pemahaman pemilih musiman mereka. Kandidat yang ingin mempertahankan pasar akan memilih sikap yang bertentangan dari kandidat yang menerapkan strategi ofensif. Seorang kandidat yang menerapkan strategi defensif menjalankan sebuah pemeliharaan secara intensif terhadap multiplikator yang ada serta menawarkan intensif kepada mereka. Data tentang keberhasilan yang diperoleh disebarluaskan di lingkungan sekitar, investasi terutama dilakukan dalam bidang kehumasan. Dalam organisasi, proses semakin

dipermudah, rutinitas dikembangkan, dan dengan demikian pengeluaran ditekan.

b. Strategi Menyerahkan pasar

Strategi menyerahkan pasar dapat memiliki dua arti. Pertama, seorang kandidat ingin menyerah dan dalam keadaan tertentu melebur ke kandidat yang lain (koalisi). Kedua, dalam pemilu yang menggunakan *balot*, dimana ada tahap-tahap pemungutan suara yang diikuti oleh kandidat-kandidat dalam pemilihan umum. Namun jika para kandidat harus menyerahkan pasarnya maka harus mempertegas ketidakikutsertaan mereka dengan memberikan alasan yang mendasar dan mengusulkan pilihan lainnya. Hal. ini dapat mencakup masalah persetujuan politik hingga pembagian kekuasaan, dan perlu disertai dengan sebuah kampanye informasi bagi para multiplikator.

Kedua strategi di atas tidak serta merta dapat diterapkan begitu saja dalam sebuah pertarungan politik. Strategi defensif lebih sering digunakan oleh pasangan calon *incumbent* yang bertujuan untuk mempertahankan konstituen mereka. Sedangkan strategi ofensif justru lebih banyak dilakukan oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pendatang baru sebagai pesaing *incumbent*.

Kaitannya dengan strategi politik, penulis berpendapat bahwa strategi yang diterapkan partai politik dalam pemenangan pasangan kandidat yang diusung adalah cara atau upaya yang harus dilakukan untuk memperoleh dukungan yang sebesar-besarnya dari calon konstituen. Oleh karena itu, cara yang dimaksud adalah dengan melaksanakan atau memaksimalkan fungsinya bagi masyarakat, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat, dari rasa yang ada dengan sendiri masyarakat akan jatuh hati dan memantapkan pilihannya.

## Strategi Politik dalam Islam

Islam adalah agama universal dan integral, mencakup segala aspek kehidupan manusia termasuk dalam hal politik. Memang secara *eksplisit* Islam tidak mengatur perkara-perkara politik, namun dalam kehidupan Nabi Muhammad dan para sahabat secara *implisit* mengisyaratkan kehidupan politik yang meliputi dari sistem hingga suksesi politik itu sendiri, hal ini ditunjukkan pada saat Nabi memimpin rakyatnya dan bahkan di zaman Nabi dan para sahabat masjid itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah saja, tetapi juga mempunyai fungsi politik yang sangat penting. Bukan saja tempat praktik politik seperti tempat musyawarah, ataupun tempat pembaiatan pemimpin/kepala Negara, dan sebagainya, tetapi masjid juga dijadikan tempat mempelajari teori-teori politik di samping ilmu agama dan lainnya (Zainal Abidin Ahmad, 1977, hal. 248).

Zainal Abidin Ahmad menuturkan bahwa Islam telah menyumbangkan sesuatu yang sangat besar yang tidak ternilai harganya, ialah suatu ‘model negara’, yang dinamakannya ‘Negara Islam’ atau *Daulah Islamiyah*. Dalam konteks Islam yang menjadi dasar Negara adalah firman Tuhan dan suara rakyat (musyawarah). Dengan tegas dapat dikatakan bahwa firman Tuhan (*Fox Dei*) dan ajaran Nabi (*Fox Prophetae*) bergabung dengan suara rakyat (*Fox Popule*), menjadi kekuasaan tertinggi di dalam negara (Zainal Abidin Ahmad, 1977, hal. 68-69). Atas dasar kerangka logika tersebut yang mana itu semua adalah bagian dari pada politik.

Dalam Ilmu politik ada tiga unsur yang saling terkait, yakni kekuasaan (*power*), kepentingan (*interest*), dan persaingan (*competition*). Sistem politik yang demokrasi diterapkan di Indonesia memang menghalalkan adanya persaingan antar partai atau tokoh-tokoh politik, persaingan dimaksudkan adalah dalam rangka meraih dan mempertahankan kekuasaan. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 sebagai dasar hukum penyelenggaraan Pemilu mengatur hal-hal penting, antara lain ‘peserta

pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan memperoleh sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota legislatif daerah yang bersangkutan' (Pasal 59 ayat 2). Mengingat besaran prosentase syarat dari Undang-undang di atas, dimungkinkan sedikit partai politik yang dapat atau mampu 'bermain tunggal'. Di samping itu beratnya persaingan politik di tingkat daerah membuat partai politik harus fleksibel dan terbuka untuk menjalin kerjasama dengan partai lainnya.

Kaitannya dengan partai Islam Haedar Nashir (2007, hal 277) membagi ke dalam dua kategori: pertama, partai politik berbasis Islam secara formal seperti PPP, PBB, dan PKS. Kelompok kedua adalah partai berbasis dukungan umat Islam seperti PKB dan PAN. Sedangkan Arsekal Salim (1999, hal. 8) berpendapat bahwa partai Islam didasarkan pada lima kriteria yaitu nama, asas, tanda gambar, tujuan/program dan konstituen. Salim menambahkan bahwa sejatinya partai politik Islam yang menggunakan label (nama, prinsip, dan simbol), atau tidak menggunakan label Islam programnya juga untuk kepentingan semua penduduk Indonesia.

Dari terminologi ini baik berbasis, berbasis atau partai yang menggunakan label atau simbol Islam tidak lepas dari kepentingan untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan dengan cara bersaing dengan sesama partai Islam sendiri dan dengan partai non Islam. Persaingan untuk meraih kekuasaan kadang ditempuh dengan cara melakukan segala cara dan strategi, salah satunya tidak memegang teguh ideologi secara kaku. Ideologi dibutuhkan sebagai daya tarik untuk menarik *massa*, namun kadang ditinggalkan hanya karena kepentingan untuk meraih kekuasaan. Partai Islam dapat bekerjasama (koalisi) dengan partai non-Islam dalam merebut kekuasaan, misalnya gubernur dan wakil gubernur didasarkan pada kepentingan yang sama atau bahkan

partai Islam tidak dapat bekerjasama (koalisi) dengan partai Islam lainnya karena berbeda kepentingan.

Anthony Downs menyampaikan pertama kali tentang teori persaingan partai dalam bukunya *An Economic Theory of Democracy*, Downs mengatakan bahwa partai politik yang bersaing meraih suara, memajang dirinya lewat kebijakan-kebijakan ataupun rencana strategis yang mencakup berbagai alternatif di sepanjang kontinum kiri-kanan, mencoba memanfaatkan usulan-usulan kebijakan itu sebagai sarana mendekati diri kepada konstituen. Para pemilih menunjukkan preferensinya dengan memberikan suaranya kepada partai yang posisinya dalam kontinum itu paling dekat dengan posisi mereka. Downs mensyaratkan bahwa partai-partai memiliki keluwesan untuk bergerak ke kiri dan ke kanan sejalan dengan dugaan keuntungan pemilu yang terlihat terutama pada pencapaian target suara (Downs *dalam* Hans Deter Klingeman, 2000, hal. 40-41).

Dalam pelaksanaan pilukada Sumatera Selatan 2013 PKS mengusung pasangan Iskandar Hasan – Hafisz Tohir yang *notabene* merupakan pasangan non-kader. Apabila dirujuk dari pengalaman PKS pada pilukada 2013, selain di Sumatera Selatan seperti Jawa Barat, dimana kader PKS di pasangkan dengan seorang Artis (Ahmad Heryawan-Dedi Mizwar) atau di Sumatera Utara dimana Gatot Pujo Nugroho berpasangan dengan Erry Nuradi yang merupakan politisi partai Golkar, namun pencalonan Erry Nuradi tidak mendapat restu dari DPP Parta Golkar. Dari pengalaman pilukada 2013 kerjasama politik dibangun sangat variatif, sehingga Partai Keadilan Sejahtera pada pemilihan umum kepala daerah Sumatera Selatan tahun 2013 dapat diteropong dengan menggunakan teori ini.

Namun, dalam kebiasaan membangun kerjasama politik (koalisi) dimungkinkan dibuat semacam kesepakatan atau kontrak politik. Kontrak politik memiliki posisi yang sangat strategis karena ia merupakan wujud pertanggung jawaban terhadap pihak-pihak

yang terlibat untuk berjalan dalam koridor yang disepakati. Selain itu, setiap kontrak tidak hanya memiliki dimensi kemanusiaan (antar pihak-pihak terlibat), tetapi juga memiliki dimensi sakralitas yang berhubungan erat dengan Tuhan YME. Menurut Dyauddin Rais dalam *Teori Politik Islam*, salah satu unsur yang paling esensial ialah berupa syarat-syarat yang harus disepakati (Rais, 2001, hal. 170). Sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran Surat al-Maidah ayat 1 :



Dilanjutkan dengan surat al-Isra ayat 34 :



Dari dalil di atas, sekiranya menjadi dasar bagi PKS dalam membangun koalisi.

Karena menurut Yusuf al-Qardhawy (1999, hal. 38) politik dengan syari'at Islam adalah sesuatu yang tidak dipisahkan. Politik adalah bagian dari syari'at Islam yang diatur oleh syari'at dan tujuannya untuk tegaknya syari'at itu. Pendapat yang sama disampaikan Anis Matta bahwa Islam adalah sistem kehidupan integral dan komprehensif yang karenanya memiliki semua kelayakan untuk dijadikan sebagai referensi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Matta menambahkan bahwa berkah sistem kehidupan Islam harus dapat dirasakan masyarakat, apabila ia benar-benar diharapkan dalam segenap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara (Matta, 2006, hal. 87-88).

Dengan kata lain bahwa dalam Islam politik itu sesuatu yang memang harus ada. Namun tetap mempunyai aturan dalam pelaksanaannya, karena strategi politik dengan maksud meraih atau mempertahankan kekuasaan dalam Islam senantiasa memegang teguh nilai-nilai moral dan tetap mementingkan kepentingan ummat dari pada kepentingan pribadi dan kekuasaan hanyalah alat yang digunakan untuk

kemaslahatan ummat dengan tujuan *amar ma'ruf nahi mungkar*.

## **F. Metodologi Penelitian**

Metodologi Penelitian pada dasarnya menerangkan proses penelitian yang dilaksanakan peneliti yang meliputi penjelasan lokasi, strategi dan jenis penelitian, sumber data yang dimanfaatkan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data, seluruh bagian ini akan dijelaskan sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan akurat mengenai penelitian yang telah dilaksanakan.

### **1. Bentuk Penelitian**

Untuk menggambarkan pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif-eksploratif. Penelitian eksploratif bertujuan untuk menggambarkan secara lebih terperinci tentang status keadaan fenomena sosial yang melibatkan manusia sebagai instrument pengumpulan data. (J. Vredenberg, 1985, hal. 53).

Deskriptif-eksploratif juga bertujuan untuk mencari fakta-fakta baru yang terdapat di lapangan untuk memperkaya informasi dalam penelitian ini. Sedangkan jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan politik. Yakni suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami strategi pemenangan Partai Keadilan Sejahtera pada pemilihan umum kepala daerah yang penulis amati di provinsi Sumatera Selatan 2013.

### **2. Sumber Data**

Suharsimi Arikunto (1998, hal. 114) mengatakan yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data penelitian itu diperoleh. Untuk mempermudah mengidentifikasi, peneliti mengklasifikasikan menjadi tiga tingkatan yaitu :

## 1. Person (Orang)

Data yang diperoleh langsung dari orang yang menjadi sumber data para stakeholder atau informan yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, yaitu antara lain:

- 1) Pimpinan/Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Provinsi Sumatera Selatan dan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, Iskandar Hasan – Hafisz Tohir. Adapun sumber data yang digunakan meliputi, nota kesepakatan Partai Keadilan Sejahtera dengan pasangan Iskandar Hasan – Hafisz Tohir, penetapan Visi dan Misi pecalonan, program kerja yang ditawarkan maupun hal lainnya yang berkenaan dengan penerapan strategi pemenangan pilkukada 2013.
- 2) Ketua/Anggota KPUD Sumatera Selatan dan PANWASLU Daerah Sumatera Selatan. Adapun sumber data yang digunakan meliputi, jumlah pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur dan partai pengusung, daftar pemilih tetap (DPT) 2013, tahapan dan pelanggaran dalam pelaksanaan pilkukada Sumsel 2013
- 3) Tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, kemasyarakatan dan pemuda, dan lembaga-lembaga kajian dan survey. Adapun sumber data yang digunakan antara lain, relevansi penerapan strategi politik PKS/pasangan Iskandar Hasan – Hafisz Tohir di tengah kehidupan masyarakat.

## 2. Place (Tempat)

Adalah tempat penelitian diperolehnya data adalah sekretariat DPW PKS Sumsel dan kantor/sekretariat/posko Iskandar Hasan – Hafisz Tohir, lokasi

kampanye dan tempat-tempat lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini atau dianggap penting sebagai sumber/tempat perolehan data.

### 3. *Paper*

Studi kepustakaan, dimana data yang diperoleh dari literatur-literatur dan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan strategi politik PKS pada Pemilu 2013.

Dari ketiga sumber data diatas akan menghasilkan dua jenis data, yaitu:

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden yang relatif lebih subyektif karena terbentuk persepsi pribadi baik yang dilakukan dengan wawancara maupun pengamatan.
- 2) Data sekunder adalah data yang berguna sebagai pemandu karena data ini diperoleh dari dokumen-dokumen dan literatur-literatur yang relatif lebih obyektif.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian adalah :

#### 1). Observasi

Observasi dilakukan dengan teknik partisipan, untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti yang terjadi dalam kenyataan, dalam metode observasi ini peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dalam pengumpulan data, sedangkan observasi itu sendiri merupakan sebuah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti (Lexy J. Moleong,, 2002, hal. 129).

Observasi ini dilakukan dengan terjun langsung dalam menjajaki mengenai obyek penelitian dan segala hal yang berkenaan dengan kegiatan penelitian tersebut. Dalam menggunakan teknik observasi ini peneliti melakukan

pengamatan khusus pada obyek penelitian yaitu: Strategi Politik Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Sumatera Selatan 2013

## 2). Wawancara

Wawancara yang dilakukan dengan dua bentuk. *Pertama*, wawancara terstruktur, yaitu dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti). *Kedua*, wawancara tak terstruktur, yaitu wawancara dilakukan apabila adanya jawaban berkembang di luar pertanyaan-pertanyaan terstruktur namun tidak terlepas dari permasalahan penelitian (Nasution, 2006, hal. 72).

Dalam penelitian ini wawancara dipergunakan untuk mengadakan komunikasi dengan pihak-pihak terkait atau subjek penelitian, antara lain Ketua atau pengurus DPW PKS Sumatera Selatan, pasangan calon kandidat, serta tim-tim pemenangan dalam rangka memperoleh penjelasan atau informasi tentang hal-hal yang belum tercantum dalam observasi dan dokumentasi.

## 3) Dokumentasi

Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen baik yang berada di kantor/sekretariat partai DPW PKS Sumsel ataupun kantor/sekretariat/posko para pasangan kandidat, yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut.

Menurut Arikunto (2003, hal. 132), teknik dokumentasi yaitu ‘mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya’.

## 4) Catatan Lapangan

Catatan lapangan ini merupakan sebuah catatan atau goresan dalam sebuah buku yang dilakukan ketika melakukan sebuah penelitian observasi ataupun wawancara pada saat terjun langsung ke lapangan.

#### 4. Teknik Analisis Data

Menurut bogdan dan biklen (1982) yang dikutip Lexy J Moleong, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dicari dan memutuskan apa yang ingin diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2002, hal. 248).

Analisis data bermaksud atas nama mengorganisasikan data, data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen, laporan, dan lain-lain, dan pekerjaan analisis data adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan dan memberikan suatu kode tertentu dan mengkategorikannya, pengelolaan data tersebut bertujuan untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif (Moeleong, 2002, hal. 103).

Dalam menganalisis data ini peneliti akan memproses setiap data lapangan, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar mengenai strategi politik Partai Keadilan Sejahtera pada pemilihan Umum Kepala Daerah Sumatera Selatan 2013, guna mengambil suatu kesimpulan berdasarkan pikiran dan intuisi peneliti. Jadi dalam menganalisis data ini harus menelaah semua agar jangan sampai ada yang terlupakan.

Oleh karena penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif serta data yang dikumpulkan juga dalam bentuk kualitatif, maka dalam menganalisis data ini juga dilakukan secara kualitatif pula (deskriptif eksploratif) yakni digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori data penelitian guna mendapatkan suatu kesimpulan.

## G. Sistematika Penulisan

Dalam tesis ini terdiri atas lima bab yaitu :

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini akan dibahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II gambaran umum, *pertama*. gambaran Partai Keadilan Sejahtera: sejarah berdirinya partai, ideologi, dan struktur organisasi Partai Keadilan Sejahtera. Dan *kedua* gambaran provinsi Sumatera Selatan 2013.

Bab III. Dasar strategi politik PKS. Bab ini membahas PKS dan pemilu pada langsung, peta politik Sumatera Selatan, serta dasar strategi politik PKS, meliputi segmentasi, targetisasi, dan *positioning*.

Bab IV yang merupakan pokok dalam penulisan tesis ini terdiri atas: faktor yang mempengaruhi PKS mengukung pasangan Iskandar Hasan – Hafisz Tohir, penerapan strategi pemenangan PKS, dan hasil suara pasangan Iskandar Hasan – Hafisz Tohir pada pemilu pada provinsi Sumatera Selatan 2013

Bab V Penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.

## Bab II

### GAMBARAN UMUM

#### A. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

##### 1. Sejarah Berdirinya Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Kelahiran partai politik sangat erat kaitannya dengan anggapan bahwa dengan membentuk partai politik mereka dapat menyatukan banyak orang yang memiliki pemikiran yang sama, sehingga gagasan dan fikiran mereka bisa dikonsolidasikan secara maksimal. Partai politik adalah suatu kelompok yang anggota-anggotanya adalah memperoleh kekuasaan dan merebut kedudukan politik, biasanya melalui cara-cara yang konstitusional, untuk melaksanakan program-programnya. Dalam konteks sejarahnya, partai politik pertama kali lahir di negara-negara Eropa Barat seperti Inggris dan Perancis pada abad ke-19 (Miriam Budiardjo, 2010, hal. 398 dan 403-404).

Secara umum, partai dapat digolongkan menjadi dua, yaitu *patronage party* (partai lindungan) dan *ideology party* (partai ideologi). Jenis partai yang pertama, adalah *patronage party* (partai lindungan). *Patronage party* adalah partai politik yang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Karena hanya berperan sebagai penghubung, partai jenis ini biasanya terdiri dari berbagai aliran politik yang ada dalam masyarakat yang sepakat untuk bernaung / berlindung di bawahnya untuk memperjuangkan suatu program tertentu. *Patronage party* biasanya hanya mengutamakan kemenangan dalam pemilu, sedangkan dalam masa antara dua pemilu biasanya kurang aktif. *Patronage party* mengutamakan kekuatannya berdasarkan keunggulan jumlah anggotanya, sehingga partai ini biasanya juga disebut sebagai partai massa (Miriam Budiardjo, 2010, hal. 396). Dalam

realitas politik, biasanya partai jenis inilah yang lebih berpeluang menjadi pemenang pemilu. Di Indonesia partai-partai yang masuk dalam kategori ini misalnya adalah Partai Demokrat, PDIP, dan Golkar.

Partai jenis yang kedua adalah *ideology party* (partai ideologi). *Ideology party* adalah partai yang bersandar pada suatu ideologi tertentu. Pimpinan partai, yang biasanya sangat sentral, secara ketat menjaga kemurnian doktrin politik yang dianutnya dengan jalan menyaring terhadap calon anggotanya. Pendidikan kader sangat diutamakan dalam partai jenis ini, dan untuk menjadi pimpinan harus memenuhi berbagai kualifikasi dan lulus dalam berbagai tahap seleksi yang biasanya dilakukan dengan ketat, sehingga *ideology party* sering disebut juga dengan partai kader. Partai ini mempunyai pandangan hidup yang digariskan dalam kebijakan pimpinan dan berpedoman pada disiplin partai yang ketat, sehingga partai akan memecat kadernya jika menyimpang dari garis partai yang telah ditetapkan. Partai jenis ini biasanya bukanlah partai dengan jumlah anggota yang besar dan bukan pula partai yang menjadi pemenang dalam pemilu (Miriam Budiardjo, 2010, hal.399). Dalam dua kategori partai di atas, PKS dapat dimasukkan dalam kategori yang kedua, yaitu *ideology party* (partai ideologi) atau partai kader. Basis kader dari PK/PKS adalah Jama'ah Tarbiyah.

Relasi antara Jama'ah Tarbiyah sebagai organisasi induk dan PKS sebagai partai terangkum dalam kaidah yang populer dikalangan PKS yaitu: *al-jama'ah huwa al-hizb, wa al-hizb huwa al-jama'ah*, yang artinya: jama'ah (organisasi induk) adalah partai, dan partai adalah jama'ah (Sapto Waluyo, 2005, hal. 32). Jama'ah Tarbiyah terdiri atas lima elemen penting. Pertama, DDII dengan tokoh utamanya adalah Mohammad Natsir (1908-1993 M). Kedua, elemen jaringan dakwah kampus (Lembaga Dakwah Kampus/LDK). Ketiga, elemen alumnus perguruan tinggi dari Timur Tengah atau perguruan tinggi yang berafiliasi ke Timur Tengah, misalnya LIPIA

Jakarta. Keempat, para aktivis ormas Islam maupun kepemudaan Islam. Kelima, para dai lulusan pesantren. Lima elemen tersebut saling melengkapi dan menguatkan. Para alumni Timur Tengah inilah yang kemudian menjadi transmitter (pemindah/penyiar) ideologi, *manhâj*, pemikiran, dan strategi *al-Ikhwân al-Muslimûn* (M. Imdadun Rahmat, 2008, hal. 24-25 dan lihat juga Yon Machmudi, 2005, hal. 17-18).

Semenjak tahun 1980-an, pemindahan pemikiran *al-Ikhwân al-Muslimûn* ke Indonesia mengalami tahap pematangan dan belangsung melalui para alumni Timur Tengah yang secara intensif telah mendalami pemikiran *al-Ikhwân al-Muslimûn*. Pada tahap ini, pemikiran *al-Ikhwân al-Muslimûn* berangsur-angsur diadopsi secara total oleh gerakan dakwah kampus. Para alumni Timur Tengah ini menjadi tenaga-tenaga ahli untuk mendidik para *murabbi* (M. Imdadun Rahmat, 2008, hal. 107).

Pada pertengahan tahun 1980-an mulai semarak kajian tentang keislaman di masjid-masjid kampus, terutama kampus-kampus umum, kajian-kajian ini dimotori oleh LDK. Komunitas kajian keislaman aktivis masjid kampus ini secara intensif mengkaji pemikiran trilogi; al-Banâ, al-Maudûfî dan Qutb. Dari sinilah kemudian tumbuh berkembang Jama'ah Tarbiyah yang dikemudian hari – pasca reformasi – menjadi kekuatan inti PK/PKS (M. Zaki Mubarak, 2007, 97-98).

Kehadiran para alumni Timur Tengah yang terjadi sekitar tahun 1983-1984 menyebabkan gerakan dakwah kampus mengalami beberapa pergeseran. Pergeseran tersebut adalah pergeseran dari model yang dikembangkan di Masjid Salman ITB Bandung kepada pola gerakan yang diilhami oleh *al-Ikhwân al-Muslimûn*. Pergeseran tersebut adalah: Pertama, nama kegiatan yang tadinya bernama usroh berubah menjadi Jama'ah Tarbiyah. Kedua, beragamnya cakupan kegiatan berupa usroh (hanya menjadi salah satu dari model kegiatan), *liqa* (pertemuan), *daurah* (kursus/pelatihan), *rihlah* (berwisata), *mabit* (kegiatan malam), *mukhayyam* (perkemahan), seminar, dan bedah buku (M. Imdadun Rahmat, 2008, hal. 111). Pada akhir tahun 1980-an, pemikiran *al-*

*Ikhwân al-Muslimûn* menjadi sangat mendominasi paradigma berfikir dan gerakan di kalangan aktivis dakwah kampus (M. Imdadun Rahmat, 2008, hal. 107).

Pendirian PK/PKS di awal reformasi diawali dengan wacana di internal Jama'ah Tarbiyah, yang menjadi elemen dasar PKS, dalam menyikapi perkembangan situasi politik pada awal reformasi. Jama'ah Tarbiyah pada awalnya menunggu dan memperhatikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) yang akan membidani lahirnya sebuah partai Islam. Namun karena partai yang dibidani oleh DDII tersebut ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan (melahirkan Partai Bulan Bintang, PBB yang berasaskan Pancasila), maka mereka pun kemudian mengadakan musyawarah sendiri. Musyawarah ini kemudian menghasilkan keputusan mendirikan Partai Keadilan (PK) – di kemudian hari berubah nama menjadi PKS dengan asas Islam (M. Imdadun Rahmat, 2008, hal. 107 dan Aay Muhammad Furqon, 2004, hal. 142). Penolakan terhadap partai baru (PBB) yang berasaskan Pancasila dan pendirian Partai Keadilan (PK) yang berasaskan Islam, semakin mempertegas konsistensi Jama'ah Tarbiyah dalam mengadopsi ideologi *al-Ikhwân al-Muslimûn*.

Partai Keadilan (PK) didirikan pada 20 Juli 1998 dan dideklarasikan pada 9 Agustus 1998 di Masjid Agung Al-Azhar Jakarta dengan berasaskan Islam (Zainal Abidin Amir, 2003, hal. 83). kepemimpinan PK dilakukan oleh tiga lembaga tinggi yang masing-masing menjalankan fungsi yang berbeda. Pertama, Majelis Pertimbangan Partai yang berfungsi sebagai lembaga legislatif. Kedua, Dewan Syariah yang berperan sebagai lembaga yudikatif. Ketiga, Dewan Pimpinan Pusat yang berfungsi sebagai lembaga eksekutif. Tiga lembaga tinggi tersebut dibawah oleh lembaga tertinggi partai bernama Majelis Syuro

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah kelanjutan dari Partai Keadilan (PK). Menurut Sapto Waluyo setelah pada pemilu 1999, PK tidak lolos dalam electoral threshold (ET) 2% suara, PK berubah menjadi PKS (dengan masa transisi

sebagaimana telah disebutkan pada paragraf sebelumnya). PKS didirikan pada 20 April 2002 dengan asas Islam. Pada 20 April 2003, setelah satu tahun didirikan, Partai Keadilan Sejahtera dideklarasikan di lapangan silang Monas Jakarta (Waluyo, 2005, hal. 124)

## 2. Ideologi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Ketika Jama'ah Tarbiyah pada tahun 1998 berkembang menjadi Partai Keadilan (PK), pengaruh *al-Ikhwân al-Muslimûn* semakin terlihat, misalnya dalam profil kader PKS dalam hal kekuatan jasmani dan semangat mereka mengidealisasikan pada Nabi SAW, para sahabat, dan para tokoh *al-Ikhwân al-Muslimûn*, sebagaimana kutipan berikut ini:

“Begitu pun para tokoh-tokoh dakwah sepanjang sejarah gerakan ‘Ikhwanul Muslimin’ yang bermarkas di kairo, merupakan kader-kader yang memiliki kekuatan jasmani” (Tim Departemen Kaderisasi DPP PK Sejahtera, 2005, hal 3).

“Untuk membekali kemampuan ini (pengetahuan Islam yang khusus: penulis), anda seorang murabbi dapat melakukan kegiatan seperti berikut: ...mengetahui sejarah dan gerakan dakwah Islam yang ada di dunia; Mengetahui sejarah Ikhwanul Muslimun...” (Tim Departemen Kaderisasi DPP PK Sejahtera, 2005, hal 101).

“Imam As-Syahid Hasan al Bana dalam sebuah risalahnya secara eksplisit menginginkan kader yang memiliki kekokohan dan kemandirian untuk mengemban beban dakwah” (Tim Departemen Kaderisasi DPP PK Sejahtera, 2005, hal 4).

Pengaruh *al-Ikhwân al-Muslimûn* juga terlihat pada ideologi dan *manhâj* gerakan yang sebelumnya menjadi pijakan Jama'ah Tarbiyah dalam lingkup lembaga dakwah kampus, kemudian semakin diperluas dan diperdalam, serta dilakukan pembakuan dan institusionalisasi dalam kerangka kepartaian (M. Imdadun Rahmat, 2008, hal. 112). Hal ini terlihat misalnya pada pemilihan Islam sebagai ideologi partai serta pendapat Nur Mahmudi Ismail (Presiden PK 1999-2000) bahwa masyarakat Indonesia selayaknya menyingkirkan *split pesonality*, pragmatis dan oportunistis, yaitu hanya mau

melaksanakan ajaran agamanya yang dinilai menguntungkan, sedangkan yang dinilai merugikan dibuang jauh-jauh. Dengan landasan tersebut PK meminta agama lain juga menggunakan agamanya sebagai asas partai (Zainal Abidin Amir, 2003, hal. 91).

Corak ideologi Islamis – dalam hal ini adalah *Salafi* – di dalam PKS juga terlihat baik pada AD/ART atau produk resmi partai lainnya yang banyak menggunakan istilah Arab, antara lain misalnya; fikrah Ikhwaniah, murabbi, syar'i, syari'at, jihad, *qarar* (putusan), dan syari'at Islam. Sebagaimana dalam pengucapan janji setia yang diucapkan oleh anggota Dewan Syuro berupa “*Saya berjanji kepada Allah yang Maha Agung untuk berpegang teguh pada syari'at Islam dan untuk berjihad di jalan-Nya, menunaikan syarat-syarat keanggotaan Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, melaksanakan tugas-tugas darinya dan untuk mendengar serta taat kepada pemimpinnya dalam keadaan lapang maupun sempit -selain untuk maksiat-, sekuat tenaga melaksanakannya. Dan saya bersumpah kepada Pengurus Majelis Syura untuk itu, dan Allah menjadi saksi atas apa yang saya ucapkan. ...*” (ART PKS bab III pasal 6). Selanjutnya adalah penghitungan batas usia minimal - untuk dapat menjabat posisi-posisi tertentu - dan masa khidmat kepengurusan partai, digunakan hitungan tahun Hijriah (AD/ART PKS). Pengaruh *al-Ikhwân al-Muslimûn* di dalam PKS terlihat juga dalam ART bab II pasal (3) dan pasal (4) bahwa untuk mencapai tujuan partai maka dilakukan kegiatan dakwah dan tarbiyah islamiyah.

Corak Salafi di dalam PKS terlihat dalam idealisasi para sahabat dan generasi awal Islam (*al-Salafu al-Shâlih*) sebagai contoh kader PKS, misalnya dalam berdakwah. Sebagaimana semangat dakwah Abu Bakar dalam merekrut tokoh-tokoh muda yang berpengaruh di masyarakat kala itu, semangat panglima perang Amru bin Ash dalam menundukan Mesir, dan semangat para tentara Islam dalam menundukan Spanyol. Di samping itu peran dan semangat dakwah para tokoh Salafi juga menjadi model ideal bagi profil kader PKS, hal ini terlihat dalam kutipan berikut ini:

“Bagaimana peran yang dimainkan Muhammad bin Abdul Wahhab di Nejed, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha dan Sang Murabbi, Asy-Syahid Hasan Al Bana di Mesir ketika membangun pondasi dakwahnya” (Tim Departemen Kaderisasi DPP PK Sejahtera, 2005, hal. 11).

Dalam *Tim Departemen Kaderisasi DPP PK Sejahtera* corak Salafî terlihat dalam hal memurnikan akidah dari *bid'ah* dan *khurafat* sebagai salah satu indikator kekokohan kader PKS, sebagaimana kutipan berikut ini :

Indikator Kokoh Ma'nawiah

1. Ikhlas dalam berdakwah
2. Senantiasa memurnikan akidah dari bid'ah dan khurafat
3. .... dan seterusnya (2005, hal. 11).

Kumpulan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Pusat (DSP) PKS, ada salah satu fatwa yang membahas tentang bid'ah. Di dalam membahas bid'ah, DSP PKS mengutip pendapat Hasan al-Banâ tentang bid'ah bahwa “Setiap *bid'ah* dalam agama yang tidak ada landasannya dianggap baik oleh manusia dengan hawa nafsu mereka, baik penambahan atau pengurangan adalah sesat. Dan wajib memerangi dan menghancurkannya dengan cara yang utama dan tidak menyebabkan kejahatan yang lebih besar”. Sedangkan sikap yang direkomendasikan oleh DSP PKS adalah memperbolehkan para dai (kader PKS) mendatangi dan melakukan bid'ah yang masih diperselisihkan oleh para ulama seperti tahlilan dan maulid Nabi SAW, sambil tetap berupaya sedapat mungkin untuk memperbaiki tata caranya. Sedangkan untuk jenis bid'ah yang sudah jelas kesesatannya seperti tradisi *ruwatan*, para dai harus tegas menolak dan meninggalkannya dan tetap berpegang teguh pada sunnah Rasulullah SAW (Dewan Syari'ah Pusat PK Sejahtera, 2006, hal. 77 dan 80).

Di kalangan para penganut islamis – khususnya di Indonesia-pengindentikan sesuatu yang ‘berbau Arab’ dengan Islam adalah hal yang biasa, dan pada tingkat tertentu menjadi indikasi tingkat penghayatan terhadap nilai-nilai Islam dalam

kehidupan (islami). Menurut penulis, hal inilah yang mempengaruhi penggunaan banyak istilah ‘Arab’ dalam AD/ART dan produk resmi partai lainnya. Sapto Waluyo – salah satu penulis ‘internal’ PKS, yang dalam biografi penulis juga menyatakan bahwa Hasan al-Banâ adalah guru yang tidak pernah dijumpainya namun terus memompa semangat hidupnya, Waluyo juga mengklasifikasikan PKS dalam partai yang beraliran islamis (Sapto Waluyo, 2005, hal. 133 dan 140). Hal-hal tersebut di atas merupakan ‘ekspresi kecil’ (baca: ekspresi alam bawah sadar komunitas) yang menggambarkan ideologi politik Islam yang dianut oleh PKS.

Di samping pengaruh *al-Ikhwân al-Muslimân*, pengaruh pemikir *Salafi* lainnya seperti Abû al-A’la al-Maudûdî juga terlihat di dalam PKS. Al-Maudûdî adalah pemikir politik kontemporer dari kalangan tradisional (baca: *Salafi*) yang merumuskan konsepsi sistem politik Islam. Pengaruh ini terlihat misalnya pada struktur partai yang terdiri dari: Majelis Syuro (selaku *ahlul halli wal ‘aqdi* mirip dengan legislatif dalam konsepsi ‘trias politika’), Dewan Syariah (yang mirip dengan yudikatif dalam konsepsi ‘trias politika’), dan Dewan Pengurus Pusat (selaku *tanfidiyah* yang mirip dengan eksekutif dalam konsepsi ‘trias politika’). Pengaruh al-Maudûdî dalam struktur PK/PKS merupakan hal yang wajar, karena memang dari awal para aktivis PK/PKS, di samping menggeluti pemikiran para tokoh *al-Ikhwân al-Muslimân* juga menggeluti pemikiran al-Maudûdî.

### **3. Struktur Partai Keadilan Sejahtera (PKS)**

Dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengatur tentang struktur organisasi partai yang terdiri dari lima tingkatan, yaitu: struktur tingkat pusat, struktur tingkat provinsi, struktur tingkat kabupaten/kota, struktur tingkat kecamatan, struktur tingkat kelurahan/desa. Struktur organisasi di tingkat pusat terdiri dari lima bagian, yaitu: Majelis Syuro, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan Pengurus Pusat, dan Dewan

Syariah Pusat. Struktur organisasi di tingkat provinsi terdiri dari tiga, yaitu: Majelis Pertimbangan Wilayah, Dewan Pengurus Wilayah, dan Dewan Syariah Wilayah. Struktur organisasi di tingkat kabupaten/kota terdiri dari tiga, yaitu: Majelis Pertimbangan Daerah, Dewan Pengurus Daerah, dan Dewan Syariah Daerah. Struktur organisasi di tingkat kecamatan adalah Dewan Pengurus Cabang. Sedangkan struktur organisasi di tingkat kelurahan / desa adalah Dewan Pengurus Ranting (DPRa). Selain struktur organisasi di atas, PKS juga membentuk unit pembinaan dan pengkaderan yang diatur dalam panduan Dewan Pengurus Pusat. Sedangkan hirarki peraturan di dalam PKS adalah AD/ART partai, keputusan musyawarah nasional, keputusan Majelis Syuro, dan peraturan partai (Anggaran Rumah Tangga PKS Pasal 6 ayat 1 b).

Majelis Syuro adalah lembaga tertinggi partai yang berfungsi sebagai lembaga *ahlul halli wal 'aqdi* di dalam PKS. Tugas dan wewenang Majelis Syuro adalah sebagai berikut: (1) Setelah Majelis Syuro dilantik oleh anggota inti, Majelis Syuro bertugas memilih dan menetapkan Ketua Majelis Syuro, dan menyusun visi misi partai; (2) atas usulan ketua Majelis Syuro, Majelis Syuro menetapkan: (a) ketua Majelis Pertimbangan Pusat dan beberapa orang anggota Majelis Pertimbangan Pusat, (b) presiden partai, sekretaris jenderal, dan bendahara umum Dewan Pengurus Pusat dan beberapa orang tertentu sebagai anggota Dewan Pengurus Pusat, dan (c) ketua Dewan Syariah Pusat dan beberapa anggota Dewan Syariah Pusat; (3) mengubah dan menetapkan AD/ART (4) menentukan platform, dan visi misi partai; (5) menetapkan kebijakan dasar dan rencana strategis partai; (6) menetapkan anggaran belanja Majelis Syuro; (7) membahas program kerja tahunan, rancangan anggaran, laporan umum, laporan penggunaan anggaran, dan laporan kekayaan partai; (8) membentuk komisi-komisi tetap dan/atau sementara di lingkungan Majelis Syuro; (9) mengevaluasi kinerja Dewan Pimpinan Tingkat Pusat; (10) menentukan sikap tentang berbagai aliran, kelompok, dan persoalan yang berkembang di Indonesia; (11) menerima pengunduran

diri pimpinan dan/atau anggota dari kepengurusan partai yang diangkat berdasarkan keputusan Majelis Syuro; (12) dan menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atas rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (Anggaran Dasar PKS Pasal 11 ayat 1- 3). Masa khidmat Majelis Syuro adalah lima tahun Hijriyah. Jika dilihat tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Syuro, maka lembaga ini memiliki peran yang sangat sentral dalam struktur organisasi di dalam Partai Keadilan Sejahtera.

Dewan Pimpinan Tingkat Pusat merupakan lembaga tinggi partai. Lembaga ini berfungsi sebagai badan pekerja Majelis Syuro. Dewan Pimpinan Tingkat Pusat diketuai oleh ketua Majelis Syuro. Lembaga ini anggotanya adalah: ketua Majelis Pertimbangan Pusat, presiden partai, ketua Dewan Syariah Pusat, sekretaris jenderal dan bendahara umum Dewan Pengurus Pusat. Dewan Pimpinan Tingkat Pusat memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: (1) melaksanakan putusan Majelis Syuro; (2) mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan putusan Majelis Syuro; (3) menyelenggarakan musyawarah Majelis Syuro (Anggaran Dasar PKS Pasal 12 ayat 1-3 dan ayat 4a, 4b, dan 4c).

Tugas Dewan Pimpinan Tingkat Pusat yang ke (4) adalah mengesahkan rancangan struktur dan kepengurusan partai di tingkat pusat; (5) membuat kebijakan partai serta memberikan rekomendasi nama-nama berkaitan dengan pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dan pemilihan lainya yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku, serta jabatan strategis lainya; (6) menentukan sikap partai (jika Majelis Syuro tidak dapat melaksanakan) dan melaporkannya kepada Majelis Syuro; (7) menentukan sikap terhadap fitnah, kritik, pengaduan, dan tuduhan yang berkaitan dengan partai dan/atau anggota partai sesuai dengan AD/ART serta peraturan partai dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; (8) menunjuk utusan untuk mewakili

partai yang akan ditempatkan pada sebuah lembaga/organisasi, atau yang akan mengikuti kongres/seminar baik di dalam negeri maupun luar negeri (Anggaran Dasar PKS Pasal 12 ayat 4d - 4i ).

Tugas Dewan Pimpinan Tingkat Pusat yang ke (9) adalah menugaskan kepada setiap anggota Majelis Syuro untuk mengadakan kunjungan perseorangan ataupun bersama-sama ke daerah pemilihannya atau daerah yang ditentukan; (10) jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan dan kebijakan partai, memerintahkan Dewan Pengurus Pusat membekukan struktur organisasi dan/atau kepengurusan Majelis Pertimbangan Partai, Dewan Pengurus Wilayah, dan/atau Dewan Syariah Wilayah melalui mekanisme yang diatur dalam putusan Majelis Syuro; (11) membahas laporan tahunan dan laporan pertanggung jawaban Dewan Pertimbangan Pusat, Dewan Pengurus Pusat, dan Dewan Syariah Pusat; (12) menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Majelis Syuro. Masa khidmat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat adalah 5 (lima) tahun (Anggaran Dasar PKS Pasal 12 ayat 4j-4m, dan ayat 5).

Pada tingkat wilayah, terdapat Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah. Dewan pimpinan wilayah adalah forum koordinasi dan konsultasi berkenaan dengan keputusan musyawarah nasional, keputusan musyawarah kerja nasional, hasil musyawarah wilayah, hasil musyawarah kerja wilayah, serta sebagai forum koordinasi dan konsultasi mengenai tugas, fungsi dan kewenangan Majelis Pertimbangan Wilayah, Dewan Pengurus Wilayah, dan Dewan Syariah Wilayah. Hasil kesepakatan dan / atau tausiyah ditindaklanjuti oleh Majelis Pertimbangan Wilayah, Dewan Pengurus Wilayah, dan Dewan Syariah Wilayah (Anggaran Rumah Tangga PKS Pasal 39 ayat 1 dan 2).

Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah dapat mengundang pihak-pihak yang berkenaan dengan tugas, fungsi dan kewenangan Majelis Pertimbangan Wilayah, Dewan Pengurus Wilayah, dan / atau Dewan Syariah Wilayah. Peserta musyawarah Dewan Pimpinan

Tingkat Wilayah adalah sebagai berikut: (1) ketua dan sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah; (2) ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, dan ketua bidang pembinaan kader Dewan Pengurus Wilayah; (3) ketua dan sekretaris Dewan Syariah Wilayah; (4) unsur Dewan Pengurus Pusat dapat menghadiri musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah. Hasil Musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah disosialisasikan sesuai dengan kepentingannya melalui jajaran struktur organisasi partai di tingkat provinsi ke bawah. Musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah dilaksanakan sekurang-kurangnya tiga bulan sekali (Anggaran Rumah Tangga PKS Pasal 39 ayat 3-7).

Dewan Pimpinan Tingkat Daerah adalah forum koordinasi dan konsultasi berkenaan dengan keputusan musyawarah nasional, keputusan musyawarah kerja nasional, hasil musyawarah wilayah, hasil musyawarah kerja wilayah, hasil musyawarah daerah, hasil musyawarah kerja daerah, serta sebagai forum koordinasi dan konsultasi mengenai tugas, fungsi dan kewenangan Majelis Pertimbangan Daerah, Dewan Pengurus Daerah, dan Dewan Syariah Daerah. Hasil kesepakatan dan / atau tausiyah ditindaklanjuti oleh Majelis Pertimbangan Daerah, Dewan Pengurus Daerah, dan Dewan Syariah Daerah (Anggaran Rumah Tangga PKS Pasal 52 ayat 1 dan 2).

Dewan Pimpinan Tingkat Daerah dapat mengundang pihak- pihak yang berkenaan dengan tugas, fungsi dan kewenangan Majelis Pertimbangan Daerah, Dewan Pengurus Daerah, dan / atau Dewan Syariah Daerah. Peserta musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Daerah adalah sebagai berikut: (1) ketua dan sekretaris Majelis Pertimbangan Daerah; (2) ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, dan ketua bidang pembinaan kader Dewan Pengurus Daerah; (3) ketua dan sekretaris Dewan Syariah Daerah; (4) unsur Dewan Pengurus Wilayah dapat menghadiri musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Daerah. Hasil Musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Daerah disosialisasikan sesuai dengan kepentingannya melalui

jajaran struktur organisasi partai di tingkat kabupaten / kota ke bawah. Musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Daerah dilaksanakan sekurang-kurangnya tiga bulan sekali (Anggaran Rumah Tangga PKS Pasal 52 ayat 3-7).

Kepengurusan Majelis Pertimbangan Pusat terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan komisi-komisi. Komisi-komisi tersebut terdiri dari komisi konstitusi dan legislasi, komisi organisasi dan kewilayahan, komisi kaderisasi dan kewanitaan, komisi kebijakan publik, dan komisi kajian strategis. Di samping itu Majelis Pertimbangan Pusat atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat dapat membentuk dewan pakar di tingkat pusat (Anggaran Rumah Tangga PKS Pasal 15).

Anggota Majelis Pertimbangan Pusat sebanyak-banyaknya terdiri atas sepertiga anggota Majelis Syuro. Persyaratan untuk menjabat sekretaris Majelis Pertimbangan Pusat adalah sebagai berikut: (1) anggota Majelis Syuro; (2) pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur partai tingkat pusat; (3) memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Majelis Pertimbangan Partai; (4) menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas Majelis Pertimbangan Pusat (Anggaran Rumah Tangga PKS Pasal 16 ayat 1-2).

Atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, ketua Majelis Pertimbangan Pusat melengkapi struktur dan kepengurusan anggota yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) sekurang-kurangnya anggota ahli; (2) pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan organisasi partai di tingkat pusat atau provinsi; (3) memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Majelis Pertimbangan Pusat; (4) menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas dan fungsi Majelis Pertimbangan Pusat (Anggaran Rumah Tangga PKS Pasal 16 ayat 4).

Kedudukan Majelis Pertimbangan Pusat adalah sejajar dengan Dewan Pengurus Pusat, dan Dewan Syariah Pusat. Masa khidmat Majelis Pertimbangan

Pusat adalah 5 (lima) tahun Hiriyah. Di tingkat wilayah, Majelis Pertimbangan Wilayah sejajar dengan Dewan Pengurus Wilayah, dan Dewan Syariah Wilayah. Masa khidmat Majelis Pertimbangan Wilayah adalah 4 (empat) tahun. Sedangkan di tingkat daerah, Majelis Pertimbangan Daerah sejajar dengan Dewan Pengurus Daerah, dan Dewan Syariah Daerah. Masa khidmat majelis pertimbangan daerah adalah 3 (tiga) tahun. Majelis Pertimbangan Pusat berada di bawah pengawasan dan koordinasi Dewan Pimpinan Tingkat Pusat dan bertanggung jawab kepada Majelis Syuro. Majelis Pertimbangan Wilayah berada di bawah pengawasan dan koordinasi Dewan Pengurus Pusat dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Musyawarah Wilayah. Majelis Pertimbangan Daerah berada di bawah pengawasan dan koordinasi Dewan Pengurus Wilayah dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Wilayah melalui Musyawarah Daerah (Anggaran Dasar PKS Pasal 13 ayat 1-2).

Tugas dan wewenang Majelis Pertimbangan Pusat adalah sebagai berikut: (1) memberi pertimbangan, rekomendasi, dan supervisi kepada Dewan Pengurus Pusat dan/atau Dewan Syariah Pusat terhadap perumusan peraturan, pelaksanaan kebijakan, dan program partai untuk menjamin tetap sesuai dengan tujuan partai dan putusan Majelis Syuro; (2) menetapkan dan mensosialisasikan pedoman partai; (3) menetapkan/mengambil keputusan terhadap produk peraturan partai yang saling bertentangan dan tumpang tindih; (4) membahas rancangan pedoman atas usul Dewan Pengurus Pusat atau Dewan Syariah Pusat; (5) menyusun rencana program dan anggaran untuk diajukan kepada Majelis Syuro melalui Dewan Pengurus Pusat; (6) mengajukan laporan kerja dan kinerja selama enam bulan kepada Dewan Pengurus Pusat (Anggaran Dasar PKS Pasal 13 ayat 3).

Dewan Pengurus terdiri dari Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Pengurus Daerah, Dewan Pengurus Cabang, dan Dewan Pengurus Ranting. Masa khidmat Dewan Pengurus Pusat adalah 5 (lima) tahun, masa khidmat Dewan

Pengurus Wilayah adalah 4 (empat) tahun, masa khidmat Dewan Pengurus Daerah adalah 3 (tiga) tahun, dan masa khidmat Dewan Pengurus Cabang adalah 2 (dua) tahun, dan masa khidmat Dewan Pengurus Ranting adalah 1 (satu) tahun (Anggaran Dasar PKS Pasal 14 ayat 1).

Dewan Pengurus Pusat berada dalam pengawasan dan koordinasi Dewan Pimpinan Tingkat Pusat dan bertanggung jawab kepada Majelis Syuro. Dewan Pengurus Wilayah berada dalam pengawasan dan koordinasi Dewan Pengurus Pusat dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Pusat melalui musyawarah wilayah. Dewan Pengurus Daerah di bawah pengawasan dan koordinasi Dewan Pengurus Wilayah dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Wilayah melalui musyawarah daerah. Dewan Pengurus Cabang berada di bawah pengawasan dan koordinasi Dewan Pengurus Daerah serta bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Daerah melalui musyawarah cabang. Dan Dewan Pengurus Ranting di bawah pengawasan dan koordinasi Dewan Pengurus Cabang dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Cabang melalui musyawarah ranting (Anggaran Dasar PKS Pasal 14 ayat 2).

Dewan Pengurus Pusat memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: (1) menetapkan dan mensosialisasikan panduan Dewan Pengurus Pusat; (2) melaksanakan *manhâj* tarbiyah (sistem pembinaan dan pengkaderan) dan mengontrol pelaksanaannya; (3) presiden partai melakukan pembekuan struktur organisasi dan/atau kepengurusan partai di tingkat kabupaten/kota tertentu jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan dan kebijakan partai, atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat; (4) menyampaikan kerja dan kinerja setiap 6 bulan kepada Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (Anggaran Dasar PKS Pasal 14 ayat 3).

Sedangkan tugas struktural Dewan Pengurus Pusat adalah sebagai berikut: (1) melaksanakan keputusan musyawarah nasional dan putusan Majelis Syuro; (2) menarik dan mengelola iuran anggota partai; (3) membentuk dan menetapkan struktur dan

kepengurusan Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah; (4) menetapkan struktur dan kepengurusan Dewan Syariah Wilayah atas pembentukan yang diajukan oleh Dewan Syariah Pusat; (5) menerima dan mengelola wakaf, hibah, sumbangan sukarela yang halal, sah, dan tidak mengikat; (6) menyampaikan laporan perbendaharaan dan keuangan partai serta evaluasi berkala kepada ketua Majelis Syuro melalui Dewan Pimpinan Tingkat Pusat; (7) menetapkan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Pusat; (8) melakukan seleksi atas daftar nama calon sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang diusulkan oleh musyawarah pimpinan tingkat daerah melalui Dewan Pengurus Wilayah; (9) menetapkan calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; (10) menetapkan calon kepala daerah/wakil kepala daerah tingkat provinsi atas rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (Anggaran Rumah Tangga PKS Pasal 19)

Dewan Pengurus Pusat dipimpin oleh presiden partai, dan presiden partai berhak bertindak untuk dan atas nama partai sesuai ketentuan AD/ART. Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat terdiri dari: (1) presiden partai; (2) seorang sekretaris jenderal dan beberapa wakil sekretaris; (3) seorang bendahara umum dan beberapa wakil bendahara; (4) beberapa bidang dan badan; (5) beberapa departemen. Atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, presiden partai melengkapi keanggotaan pada jabatan bidang, badan, dan departemen (Anggaran Rumah Tangga PKS Pasal 17 ayat 1-3 dan pasal 18 ayat 2)

Dewan Syariah Pusat terdiri dari; Dewan Syariah Pusat, Dewan Syariah Wilayah, dan Dewan Syariah Daerah. Dewan Syariah Pusat berkedudukan di pusat dengan masa khidmat lima (5) tahun, serta kedudukannya sejajar dengan Majelis Pertimbangan Pusat dan Dewan Pengurus Pusat. Dewan Syariah Wilayah berkedudukan di provinsi dengan masa khidmat empat (4) tahun, serta kedudukannya

sejajar dengan Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah. Dewan Syariah Daerah berkedudukan di kabupaten/kota dengan masa khidmat tiga (3) tahun. Kedudukan Dewan Syariah Daerah, sejajar dengan Majelis Pertimbangan Daerah dan Dewan Pengurus Daerah (Anggaran Dasar PKS Pasal 15 ayat 1).

Dewan Syariah Pusat di bawah koordinasi dan pengawasan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, serta bertanggung jawab kepada ketua Majelis Syuro. Dewan Syariah Wilayah berada dalam pengawasan, koordinasi serta bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Pusat melalui musyawarah daerah. Dewan Syariah Daerah berada di bawah pengawasan, koordinasi, serta bertanggung jawab pada Dewan Pengurus Wilayah melalui musyawarah daerah. Tugas dan wewenang Dewan Syariah Pusat adalah: (1) menetapkan dan mensosialisasikan fatwa dan panduan Dewan Syariah Pusat; (2) menetapkan putusan atas masalah-masalah syar'i yang dilimpahkan oleh Majelis Syuro; (3) menetapkan putusan atas masalah-masalah syar'i di lingkungan partai yang berasal dari Dewan Syariah Wilayah; (4) menetapkan landasan syari'ah bagi partai; (5) menyampaikan laporan kerja dan kinerja setiap enam bulan kepada Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (Anggaran Dasar PKS Pasal 15 ayat 2 dan 3).

Kepengurusan Dewan Syariah pusat terdiri dari: seorang ketua, seorang sekretaris, dan lajnah-lajnah. Fungsi Dewan Syariah Pusat adalah sebagai berikut: (1) lembaga fatwa; (2) lembaga qadha; (3) lembaga banding; (4) lembaga pengawas pelaksanaan ajaran Islam dalam partai; (5) lembaga yang merepresentasikan pandangan dan sikap syariah partai; (6) lembaga arbitrase di internal partai; (7) lembaga pendidikan dan pelatihan syariah; (8) lembaga pelaksana tugas-tugas khusus yang ditetapkan oleh Majelis Syuro (Anggaran Rumah Tangga PKS Pasal 23 ayat 1 dan 2).

Jumlah maksimal anggota Dewan Syariah Pusat adalah sepertiga anggota Majelis Syuro. Sedangkan ketua Dewan Syariah Pusat berkedudukan sebagai Qadli

dan Mufti. Lajnah- lajnah di dalam Dewan Syariah Pusat terdiri dari: (1) *Lajnah Buhuts*, adalah komisi yang melakukan kajian keilmuan sebagai bahan fatwa dan / atau bayan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Pusat; (2) *Lajnah Tadrib*, adalah komisi yang merancang dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus Dewan Syariah Pusat; (3) *Lajnah Taqnin*, adalah komisi yang melakukan telaah untuk kontribusi partai pada aspek syar'I terhadap rancangan peraturan perundang-undangan di Indonesia; (4) *Lajnah Ifta*, adalah komisi yang menyiapkan draf fatwa yang akan dikeluarkan oleh Dewan Syariah Pusat; (5) *Lajnah Tahqiq*, adalah komisi yang melakukan kajian terhadap setiap permasalahan pelanggaran syar'i yang diajukan kepada Dewan Syariah Pusat; (6) *Lajnah Qada*, adalah komisi yang memproses suatu masalah atas pihak yang diajukan kepada Dewan Syariah Pusat (Anggaran Rumah Tangga PKS Pasal 23 ayat 3,4 dan 5). Atas persetujuan ketua Majelis Syuro, ketua Dewan Syariah Pusat berwenang untuk melengkapi jabatan-jabatan lainya dan keanggotaan di Dewan Syariah Pusat dengan memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya sebagai anggota ahli dan pernah menjadi pengurus dan / atau kepanitiaan partai.

Di samping struktur organisasi tersebut di atas, melalui jaringan Tarbiyahnya, PKS juga mendirikan berbagai lembaga-lembaga sosial. Antara lain lembaga bimbingan belajar 'Nurul Fikri', lembaga dakwah 'Khoirul Ummah', lembaga pengkajian 'SIDIK', kelompok-kelompok kesenian 'Nasyid', majalah 'Sabili', dan berbagai penerbit buku seperti: Al-Islahy Press, Pustaka Kautsar, Robbani Press, Era Intermedia, Harakatuna Publishing, As-Syaamil, dan I'tishom (M. Imdadun Rahmat, 2008, hal. 43)

Dalam bidang pelayanan, PKS (melalui bendahara umum partai) melakukan pembinaan dan koordinasi fungsional dengan lembaga-lembaga sosial kemanusiaan, seperti Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), Dompok Sosial Ummul Quro (DSUQ), dan

Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI). Dalam bidang pemberdayaan ekonomi, PKS membina dan menangani Serikat Pekerja Keadilan (SPK), Koperasi Syariah Indonesia (Kosindo), Jaringan Pengusaha Muslim Indonesia (JPMI), Indonesian Labour Foundation (ILF), Perhimpunan Petani Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI). Sedangkan dalam bidang pembinaan kewanitaan PKS mendirikan organisasi Salimah dan Pos Wanita Keadilan (M. Imdadun Rahmat, 2008, hal. 44)

PKS juga mendirikan lembaga kajian strategis, yang biasanya dibina oleh bidang kajian publik, seperti CIR, ICTECS, PAHAM, INFES, dan CYFIS. Dalam bidang pembinaan sumber daya manusia, PKS membina Masyarakat Ilmuan dan Teknologi Indonesia (MITI), Jaringan Sekolah Terpadu (JST), *Islamic Medical Association and Network Indonesia* (IMANI). Di samping itu, seperti halnya partai politik yang lainnya, PKS juga mempunyai *underbow* seperti garda keadilan, Kesatuan Aksi Pelajar Muslim Indonesia (KAPMI), Gugus Tugas Dakwah Sekolah (GTDS), Yayasan Pemuda dan Pelajar Asia Pasifik (YPPAP), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) (M. Imdadun Rahmat, 2008, hal. 44). Berbagai lembaga-lembaga sosial tersebut di atas berperan besar dalam pembinaan kader serta sebagai media mendekati diri dengan konstituen. Lembaga-lembaga ini juga memainkan fungsi sebagai 'mesin politik' partai yang signifikan.

## **B. Gambaran Provinsi Sumatera Selatan**

### **1. Kondisi daerah**

Provinsi Sumatera Selatan mempunyai luas wilayah  $\pm 87.017,42$  km<sup>2</sup> atau 8.701.742 Ha, termasuk kawasan hutan, sungai, danau, daerah rawa, dan tepian pantai. Ibukota Provinsi Sumatera Selatan berada di Kota Palembang, yang mempunyai luas wilayah 421,01 km<sup>2</sup> dan merupakan pusat pemerintahan, pendidikan, kebudayaan, bisnis dan industri. Secara geografis Sumatera Selatan cukup strategis

baik dikaitkan dengan pusat pemerintahan maupun pusat kegiatan ekonomi baik di Pulau Jawa maupun di Pulau Sumatera, yang secara spesifik terletak antara  $1^{\circ}$  -  $4^{\circ}$  LS dan  $102^{\circ} 25'$  -  $108^{\circ} 41'$  BT.

Topografi wilayah Sumatera Selatan memiliki pola yang jelas pada bentangan wilayah Barat-Timur dengan ketinggian daerah antara 400 meter sampai 1.700 meter di atas permukaan laut (dpl). Daerah yang mempunyai ketinggian antara 400 meter sampai 500 meter dpl mencakup wilayah sekitar 37 persen, daerah yang mempunyai ketinggian antara 500 meter sampai 1000 meter dpl mencakup wilayah sekitar 34 persen, dan daerah yang mempunyai ketinggian antara 1000 meter sampai 1.700 meter dpl mencakup sekitar 29 persen dari keseluruhan wilayah. Wilayah Barat merupakan wilayah pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian rata-rata mencapai 900– 1200 m dpl. Pegunungan Bukit Barisan yang melewati Provinsi Sumatera Selatan ini terdiri atas puncak Gunung Seminung (1.964 m dpl), Gunung Dempo (3.159 m dpl), Gunung Patah (1.107 m dpl), dan Gunung Bungkok (2.125 m dpl). Makin ke arah Timur kondisi topografinya berbukit, bergelombang, dan mendatar. Pantai Timur Provinsi Sumatera Selatan merupakan lahan landai dan lahan rawa pantai. Wilayah yang memiliki ketinggian terendah diukur dari permukaan laut adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan ketinggian  $\pm 8$  m, sedangkan wilayah yang memiliki ketinggian tertinggi adalah Kota Pagar Alam dengan ketinggian  $\pm 289$  m.

Provinsi Sumatera Selatan sejak berabad yang lalu dikenal juga dengan sebutan Bumi Sriwijaya; pada abad ke-7 hingga abad ke-12 Masehi wilayah ini merupakan pusat kerajaan Sriwijaya yang juga terkenal dengan kerajaan maritim terbesar dan terkuat di Nusantara. Gaung dan pengaruhnya bahkan sampai ke Madagaskar di Benua Afrika. Sejak abad ke-13 sampai abad ke-14, wilayah ini berada di bawah kekuasaan Majapahit. Selanjutnya wilayah ini pernah menjadi daerah tak bertuan dan bersarangnya

bajak laut dari Mancanegara terutama dari negeri China. Pada awal abad ke-15 berdirilah Kesultanan Palembang yang berkuasa sampai datangnya Kolonialisme Barat, lalu disusul oleh Jepang. Ketika masih berjaya, kerajaan Sriwijaya juga menjadikan Palembang sebagai Kota Kerajaan. Menurut Prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan pada 1926 menyebutkan, pemukiman yang bernama Sriwijaya itu didirikan pada tanggal 17 Juni 683 Masehi. Tanggal tersebut kemudian menjadi hari jadi Kota Palembang yang diperingati setiap tahunnya.

## **2. Kondisi geografis dan wilayah administrasi**

Provinsi Sumatera Selatan secara administrasi berbatasan dengan Provinsi Jambi di sebelah utara, dengan Provinsi Lampung di sebelah selatan, dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di sebelah timur, dan dengan Provinsi Bengkulu di sebelah Barat. Secara administratif Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 11 kabupaten dan 4 kota dengan ibukota Palembang. Pada tahun 2011 di Prov. Sumatera Selatan terdapat 223 kecamatan, 384 kelurahan, dan 2.823 desa (Katalog BPS:1102001, hal. 25). Adapun wilayah administrasi tersebut sebagai berikut :

1. Kabupaten Ogan Komering Ulu ( Ibukota Baturaja)
2. Kabupaten OKU Timur ( Ibukota Martapura)
3. Kabupaten OKU Selatan( Ibukota Muara Dua)
4. Kabupaten Ogan Komering Ilir ( Ibukota Kayu Agung)
5. Kabupaten Muara Enim ( Ibukota Muara Enim)
6. Kabupaten Lahat ( Ibukota Lahat)
7. Kabupaten Musi Rawas ( Ibukota Lubuk Linggau)
8. Kabupaten Musi Banyuasin ( Ibukota Sekayu)
9. Kabupaten Banyuasin ( Ibukota Pangkalan Balai)
10. Kabupaten Ogan Ilir ( Ibukota Indralaya)

11. Kabupaten Empat Lawang (Ibukota Tebing Tinggi)
12. Kota Palembang (Ibukota Palembang)
13. Kota Pagar Alam (Ibukota Pagar Alam)
14. Kota Lubuk Linggau (Ibukota Lubuk Linggau)
15. Kota Prabumulih (Ibukota Prabumulih)

Wilayah administrasi Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami perubahan. Sejak tahun 2001 hingga 2003, mengalami pemekaran dari enam kabupaten dan satu kota menjadi 10 (sepuluh) kabupaten dan empat kota. Pada tahun 2007 terbentuk satu daerah otonomi baru. Pada tahun 2013 kembali ditetapkan daerah otonomi baru di provinsi Sumatera Selatan, yaitu kabupaten [Penulak Abab Lematang Ilir](#) (Pali) dan Musirawas Utara (Muratara). Sehingga pada tahun 2013 Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 13 kabupaten dan 4 kota. Sedangkan jumlah penduduk Sumatera Selatan berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK-2) tahun 2013 mencapai 8.528.719 jiwa, 4.380.993 laki-laki dan 4.147.726 perempuan.

## Bab V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Faktor yang mempengaruhi PKS mengusung pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur pada umumnya ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam PKS itu sendiri. Misalnya: calon yang diusung harus memiliki modal jaringan, popularitas dan elaktabilitas, serta calon yang diusung juga harus memiliki modal finansial. Dari ketiga kriteria ini menjadi ganjalan bagi kalangan internal PKS untuk diusung sebagai calon gubernur atau wakil gubernur Sumatera Selatan 2013. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor dari luar PKS yang didasari obyektifikasi kepentingan rasional. Rasionalisasi yang dibangun adalah apabila PKS mengusung Alex Noerdin atau Eddy Santana, secara otomatis posisi tawar PKS akan lebih turun karena keduanya telah didukung oleh partai utama yaitu Golkar-Demokrat dan PDIP, begitu juga alasan jika PKS mengusung Herman Deru. Dengan demikian mengusung pasangan Iskandar Hasan – Hafisz Tohir adalah keputusan rasional terutama dalam hal nilai tawar (*bargaining*).
2. Pemilukada Sumatera Selatan yang diikuti oleh empat pasang calon gubernur dan calon wakil gubernur. Setidaknya secara *positioning* pasangan calon yang diusung PKS, Iskandar Hasan – Hafisz Tohir dengan *tagline* politik Sumsel Baru, *thema* Bersih, dan *background* Putih dinilai efektif untuk menjawab kebosanan wajah lama politikus Sumsel. Strategi yang diterapkan bersifat *direct marketing* (pemasaran secara langsung) dengan bentuk sosialisasi atau

kampanye yang terjun langsung ke masyarakat. Dalam prakteknya, *direct marketing* dilakukan dengan dua cara; pertama, melakukan sosialisasi atau kampanye di tempat-tempat strategis. Kedua, kampanye dengan cara datang ke kampung-kampung dan bahkan ke rumah-rumah masyarakat. Namun secara segmentasi mengalami keterbatasan mengenai basis wilayah politik pasangan kandidat dan ditambah masih kurangnya popularitas pasangan yang diusung sehingga hasil perolehan suara pada 06 April 2014 belum menghasilkan apa yang diharapkan

## **B. Saran**

1. Pada pelaksanaan pemilu pada berikutnya Partai Keadilan Sejahtera harus mulai semakin dewasa dengan dinamika politik internal maupun eksternal partai dengan tetap melakukan evaluasi-evaluasi dan memperkuat setiap proses kaderisasi yang dibentuknya, karena Partai Keadilan Sejahtera mempunyai basis pemilih yang setia. Selain itu kalangan kader juga harus melakukan penguatan disektor ekonomi dalam pengembangan jaringan politik.
2. Kegagalan Partai Keadilan Sejahtera dalam mencapai target kemenangan pada pemilu pada Sumatera Selatan 2013 adalah ketidaksesuaian antara tenggang waktu yang ditentukan dengan strategi yang akan dimainkan partai, proporsi iklan yang terlalu kecil dibandingkan dengan pasangan calon lainnya disuatu sisi dan belum adanya tokoh partai yang menjadi *icon* partai disisi lainnya.
3. penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menyediakan informasi bagi *market intelligent* atau peneliti lain yang berminat dan manaruh perhatian pada masalah yang sama. Penulis telah mengusahakan kesempurnaan tesis ini dengan semaksimal mungkin menurut kemampuan dan pengetahuan penulis. Namun bila ada kekurangan dan kesalahan, penulis mengharap kritik dan saran demi

kesempurnaan tesis ini. Akhirnya penulis mengucapkan banyak trimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.